LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN 2021

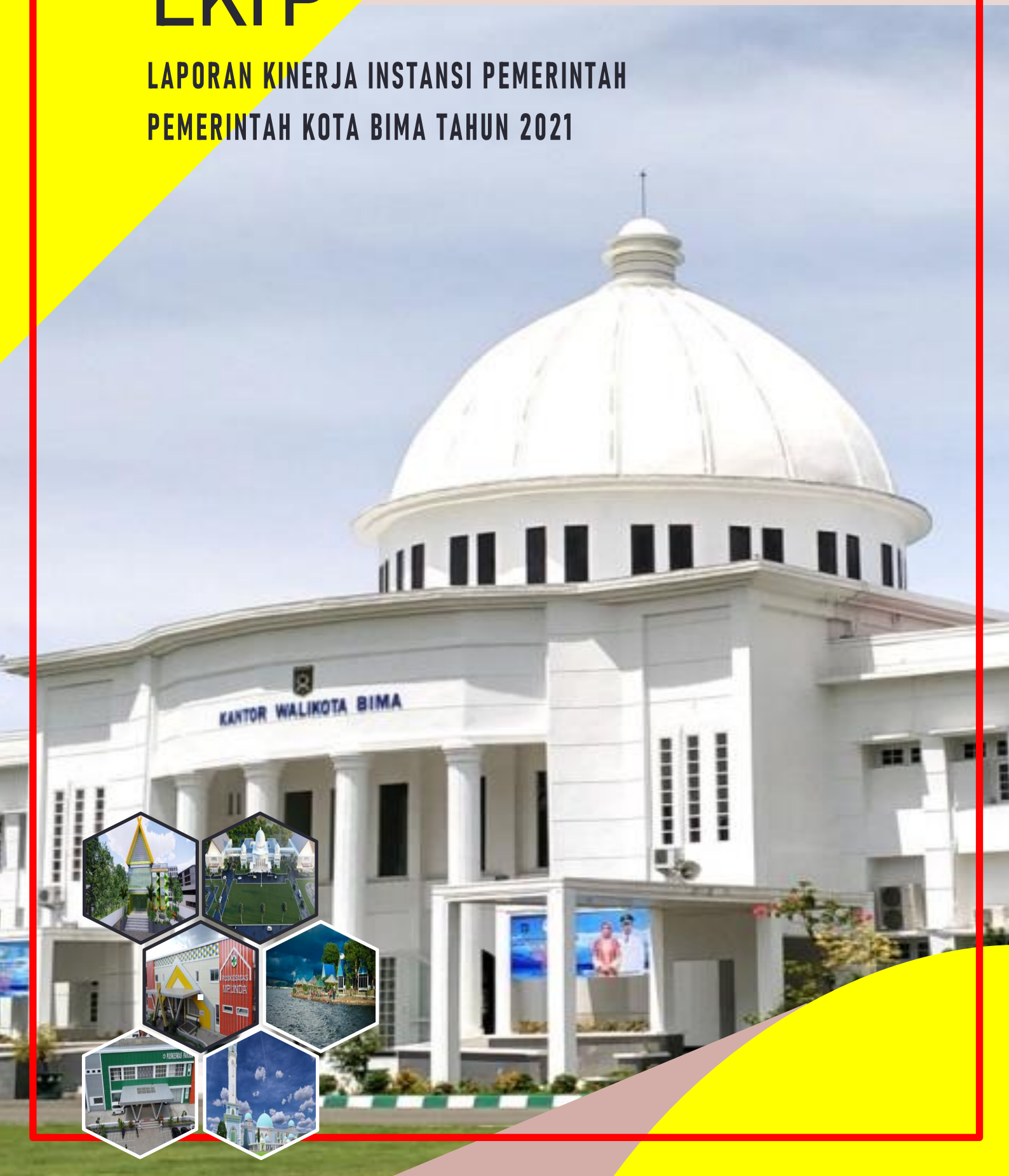

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Bima Tahun 2021 dapat diselesaikan secara baik. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bima telah sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan LKIP merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah selama Tahun 2021 dan sebagai bentuk konsistensi kami dalam upaya menciptakan transparansi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good gavernance*). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 memuat informasi tentang perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Pembangunan Kota Bima periode 2019-2023 yaitu ***MEWUJUDKAN KOTA BIMA YANG BERKUALITAS DAN SETARA MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU DAN MANDIRI.***

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Bima tidak terlepas dari kerjasama semua pihak, baik Pemerintah, swasta dan masyarakat. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pembangunan Kota Bima.

Demikian LKIP Tahun 2021 kami sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan melimpahkan rahmatNya sehingga kita bisa tetap istiqomah pada jalan kebaikan. Aamiin.

Kota Bima, 15 Maret 2022
WALIKOTA BIMA,

H. MUHAMMAD LUTFI, SE.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kota Bima Tahun 2019 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan Pemerintah yang baik (*Good Governance*). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bima disusun sesuai Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintah Kota Bima telah menetapkan 16 sasaran dan 18 indikator sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 dan Peraturan Walikota Bima Nomor : 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 51 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Bima Tahun 2019-2023. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran bahwa Pemerintah Kota Bima telah memperoleh predikat kinerja kategori sangat tinggi dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 97 persen dari 17 sasaran, yang terdiri dari ; (a) 13 sasaran termasuk kategori sangat tinggi, (b) 1 sasaran termasuk kategori tinggi, (c) 1 sasaran termasuk kategori rendah. dan (d) 2 sasaran termasuk kategori sangat rendah.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung adanya kerja sama yang sinergis dari seluruh jajaran Perangkat Daerah dan pihak-pihak yang terkait dengan didukung oleh program dan kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima tahun 2021 sebesar Rp.902.173.491.381,85 dengan realisasi sebesar Rp. 754,078,303,532.00 dengan realisasi sebesar Rp. 716,700,153,286.42 atau 95,04 persen.

Pencapaian kinerja Pemerintah Kota Bima Tahun 2021 menunjukkan keberhasilan dalam memenuhi target tahunan sesuai RPJMD 2018-2023. Adapun adanya target yang masih kurang pencapaiannya Pemerintah Kota Bima akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi untuk dilakukan perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
IKHTISAR EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Gambaran Umum Kota Bima 3
1. Letak Geografis 3
2. Luas Wilayah 3
3. Topografi 3
4. Kependudukan 4
5. Tata Kelola Pemerintahan 5
a. Pembentukan Kota Bima 5
b. Kedudukan dan Kewenangan 10
c. Perangkat Daerah 13
d. SDM Aparatur 14
e. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 15
6. Perekonomian Kota Bima 16
a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 17
b. Inflasi 18
7. Potensi Unggulan Daerah 19
C. Isu Strategis Jangka Menengah 24
BAB II PERJANJIAN KINERJA 28
A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan 28
a. Visi dan Misi 28
b. Tujuan dan Sasaran 31
B. Prioritas Daerah 33
C. Indikator Kinerja Utama 33
D. Perjanjian Kinerja 40
E. Program dan Anggaran 42

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 43
A. Capaian Kinerja Organisasi 44
1. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2021 44
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Sesuai RPJMD 47
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Capain/ Standar Provinsi NTB dan Nasional 48
4. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 50
a. Sasaran 1 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 50
b. Sasaran 2 :Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan . 54
c. Sasaran 3 : Meningkatnya Daya Beli masyarakat 56
d. Sasaran 4 : Meningkatnya Ketahanan Pangan 59
e. Sasaran 5 : Meningkatknya Pertumbuhan Ekonomi 62
f. Sasaran 6 : Menurunnya Angka Kemiskinan 65
g. Sasaran 7 : Meningkatnya Kesempatan Kerja 68
h. Sasaran 8 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 71
i. Sasaran 9 : Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah..... 82
j. Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik..... 84
k. Sasaran 11 : meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang..... 87
l. Sasaran 12 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 89
m. Sasaran 13 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah..... 90
n. Sasaran 14 : Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana 92
o. Sasaran 15 : Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban..... 94
p. Sasaran 16 : Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal..... 98
q. Sasaran 17 : Meningkatnya Pengalaman Ajaran Agama 100

B. Realisasi Keuangan 101
BAB IV : PENUTUP 102

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut pelaporan kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi PresIden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan LKIP Tahun 2019 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian LKIP Kota Bima Tahun 2021 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Walikota kepada Presiden ini disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2021.

B. Gambaran Umum Kota Bima

1. Letak Geografis

Secara geografis, Kota Bima terletak pada koordinat 8°20'- 8°30' Lintang Selatan dan antara 118°41' - 118°48' Bujur Timur , dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima
- Sebelah Timur : Kecamatan Wawo Kabupaten Bima
- Sebelah Selatan : Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima
- Sebelah Barat : Teluk Bima

2. Luas Wilayah

Secara keseluruhan Kota Bima memiliki luas wilayah 222,25 Km^2 mencakup 5 (lima) kecamatan dan 41 (empat puluh satu) kelurahan. Rincian luas wilayah berdasarkan masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Tahun 2019

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)
1.	Rasanae Barat	10,14
2.	Rasanae Timur	64,07
3.	Asakota	69,03
4.	Raba	63,73
5.	Mpunda	15,28
	Jumlah	222,25

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan SETDA Kota Bima

Jika dilihat dari luas wilayah bahwa Kecamatan Asakota sebagai kecamatan yang memiliki luas wilayah paling besar yaitu 60,03 km^2 sedangkan wilayah yang memiliki luas paling kecil adalah Kecamatan Rasanae Barat yaitu 10,14 km^2.

3. Topografi

Kota Bima didominasi oleh lahan dengan kemiringan datar dengan kelerengan 0-40 %, yaitu seluas 9.242 ha, kemudian lahan bergelombang seluas 4.994 ha, lahan dengan kemiringan curam seluas 4.534 ha, dan lahan dengan kondisi sangat curam dengan luas

2.957 ha. Rincian kemiringan lahan berdasarkan kecamatan dapat dilihat tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2
Kemiringan lahan

No	Kecamatan	Datar (0 - 2 %)	Bergelombang (2 - 15 %)	Curam (15 - 40 %)	Sangat Curam (> 40 %)
1.	Rasanae Barat	854	35	75	50
2.	Rasanae Timur	2.555	1.793	935	1.024
3.	Asakota	2.225	1.184	2.113	1.081
4.	Raba	2.950	1.850	848	627
5.	Mpunda	658	132	563	175
	Jumlah	9.242	4.994	4.534	2.957

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Bima

Pada umumnya semua kecamatan di Kota Bima didominasi oleh wilayah yang relatif datar dan bergelombang. Namun, ada 2 (dua) wilayah yang masih memiliki kemiringan sangat curam yaitu Kecamatan Asakota dan Kecamatan Rasanae Timur memiliki kelerengan lebih dari 40% mencapai 34-36 persen. Luas Kecamatan Raba dengan kemiringan diatas 40% mencapai 21 persen. Sementara dua kecamatan lain (Kecamatan Rasanae Barat dan Mpunda) kemiringan diatas 40% hanya berkisar 1-6 persen.

4. Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Bima pada tahun 2021 sebanyak 156.224 jiwa terdiri atas 73.990 jiwa penduduk laki-laki dan 75.508 jiwa penduduk perempuan. Penduduk Kota Bima mengalami pertumbuhan sebesar 0,76 %. Kepadatan penduduk di Kota Bima Tahun

2021 mencapai 702,92 jiwa/km², sebagaimana terlihat pada tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3.
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk km²
1.	Rasanae Barat	10,14	19,62	3 022,49
2.	Rasanae Timur	64,07	11,97	291,96
3.	Asakota	69,03	22,09	2 195,22
4.	Raba	63,73	24,85	609,16
5.	Mpunda	15,28	21,47	499,86
Jumlah		222,25	100	702,92

Sumber : BPS Kota Bima

Jika dilihat jumlah penduduk menurut kecamatan, penduduk terbesar berada di Kecamatan Raba sebesar 38.822 jiwa, dan yang terendah berada di kecamatan Rasanae Timur sebesar 18.706 jiwa. Rincian jumlah penduduk menurut kecamatan dapat dilihat pada gambar 1 dan tabel 1.4 berikut.

Gambar 1.1 Persebaran Penduduk di Kota Bima
Menurut Kecamatan Tahun 2021

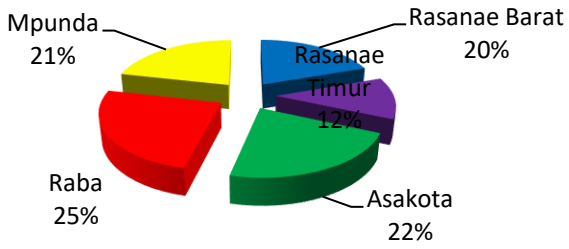

Struktur penduduk Kota Bima didominasi oleh penduduk yang berusia usia dibawah 40 tahun. Komposisi penduduk

menurut usia akan mempengaruhi kebijakan pembangunan kota. Keterkaitan komposisi penduduk dengan upaya-upaya pembangunan kota yang dilaksanakan, didasarkan kepada kebutuhan pelayanan yang harus disediakan kepada masing-masing kelompok penduduk, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan bahkan pelayanan kesejahteraan sosial lainnya. Komposisi penduduk Kota Bima menurut Struktur Usia dapat diihat pada tabel 1.5 berikut.

Tabel 1.5.
Jumlah Penduduk
Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2021

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
00-04	7.889	8.180	16.069
05-09	7.209	7.478	14.687
10-14	6.617	7.147	13.764
15-19	6.088	6.015	12.103
20-24	6.458	6.361	12.819
25-29	6.359	6.320	12.679
30-34	6.091	6.333	12.242
35-39	5.972	5.938	11.910
40-44	5.549	5.296	10.845
45-49	5.121	4.801	9.922
50-54	4.289	4.032	8.321
55-59	3.688	3.371	7.039
60-64	2.611	2.429	5.040
65-69	2.079	1.853	3.932
70-74	1.208	1.051	2.259
≥ 75	1.342	1.069	2.411
Jumlah	78.550	77.647	156.244

Sumber : BPS Kota Bima

Penduduk Kota Bima mayoritas beragama islam yaitu berjumlah 99,69 %. Kerukunan antar umat beragama sangat baik sehingga konfik antar agama tidak pernah terjadi di Kota Bima. Rincian jumlah penduduk menurut agama dapat dilihat tabel 1.6 berikut.

Tabel 1.6. : Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1.	Islam	155.760
2.	Protestan	1.501
3.	Katolik	648
4.	Hindu	294
5.	Budha	31
	Jumlah	156.244

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima

Jumlah penduduk di Kota Bima pada Tahun 2021 jika dilihat dari tingkat pendidikan, diketahui bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan SLTA/sederajat memiliki jumlah paling besar yaitu 43.287 orang atau 29 %. Selengkapnya jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Kota Bima pada tahun 2019 dapat dilihat pada gambar 2 berikut.

Gambar 1. 2
Persentase Penduduk Menurut Pendidikan

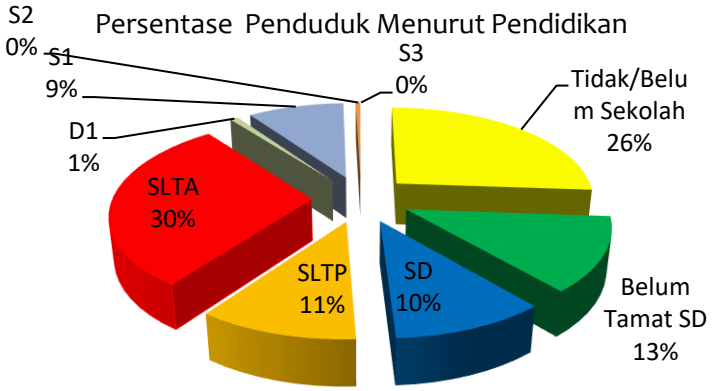

5. Tata Kelola Pemerintahan

a. Pembentukan Kota Bima sebagai Daerah Otonom

Pemerintah Kota Bima dibentuk menjadi Daerah Otonom melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, Kota Bima merupakan pusat Pemerintahan Kesultanan yang pernah mengalami masa keemasan sekitar kurun waktu 1933 M hingga 1951 M yang diperintah oleh 14 Sultan Bima. Selanjutnya memasuki era kemerdekaan Indonesia, Kesultanan Bima memilih bergabung berada dalam wilayah NKRI sehingga berubah dari Pemerintah Kesultanan Bima menjadi Pemerintah Swapraja Bima dengan pusat pemerintahan di Kota Bima.

Kemudian pada era Indonesia Serikat, Kota Bima tetap menjadi pusat Pemerintahan Daerah Swantantra Tingkat II

Bima. Kemudian pada tahun 1958 Pemerintah Swatantra Tingkat II Bima berubah menjadi Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dan tetap menjadikan Kota Bima sebagai ibukota Kabupaten Bima setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Propinsi NTB dan Undang-Undang nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Se-Propinsi Bali, NTB, dan NTT.

Seiring dengan kebutuhan dan perkembangan Kota Bima, baik sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, politik, sosial dan budaya, maka Kota Bima sejak Tahun 1998 telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai salah satu Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1998 tentang pembentukan Kota Administratif sebagaimana telah dituangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 178, tanggal 22 Oktober 1998. Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi seluruh masyarakat, maka DPRD Kabupaten Bima melalui serangkaian proses persidangan akhirnya pada tanggal 22 Pebruari 2001 mengeluarkan keputusannya tentang persetujuan peningkatan status Pemerintah Administratif Bima menjadi Pemerintah Kota Bima, dan kemudian pada tanggal 23 Pebruari 2001 Pemerintah Kabupaten Bima mengirim surat tentang usulan peningkatan

status Pemerintah Administratif Bima menjadi Pemerintah Kota Bima kepada Gubernur NTB dan DPRD NTB untuk diusulkan ke Pemerintah Pusat. Akhirnya tepat tanggal 10 April 2002 Pemerintah Kota Bima terbentuk menjadi Daerah Otonom melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

b. Kedudukan dan Kewenangan

Dengan diberlakukannya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih menekankan aspek desentralisasi yang diberikan dalam wujud otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Berkaitan dengan otonomi daerah dalam pelaksanaannya di Kota Bima dapat dijelaskan melalui 2 (dua) aspek, yaitu:

1) Aspek politik

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kota Bima dari aspek politik ditandai dengan program legislatif dalam membahas perubahan atas peraturan tentang struktur organisasi dan tata kerja dan kegiatan partai politik tingkat daerah dan DPRD sebagai mitra pemerintah daerah.

2) Administrasi

Pemerintah Kota Bima dalam melaksanakan otonomi daerah secara administratif diawali dengan melakukan identifikasi kewenangan pemerintah daerah, penataan kelembagaan, penempatan personil, pengelolaan sumber keuangan daerah, pengelolaan sarana dan prasarana (aset daerah), dan manajemen pelayanan publik. Pemerintah Kota Bima menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebanyak 25 urusan wajib untuk menyelenggarakan pelayanan dasar kepemerintahan dan 6 urusan pilihan, terdiri dari :

1) Pendidikan

2) Kesehatan

3) Lingkungan Hidup

4) Pekerjaan Umum

5) Penataan Ruang

6) Perencanaan Pembangunan

7) Perumahan

8) Kepemudaan dan Olahraga

9) Penanaman Modal

10) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

11) Kependudukan dan Catatan Sipil

12) Ketenagakerjaan

13) Ketahanan Pangan

14) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

15) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

16) Perhubungan

17) Komunikasi dan Informatika

18) Pertanahan

19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

21) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

22) Sosial

23) Kebudayaan

24) Kearsipan, dan

25) Perpustakaan

sedangkan urusan pilihan terdiri dari :

1) Kelautan dan Perikanan

2) Pertanian

3) Pariwisata

4) Industri

5) Perdagangan, dan

6) Ketransmigrasian.

c. Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Walikota Bima dibantu oleh Perangkat Daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Bima, kemudian diubah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Bima. Pemerintah Kota Bima meiliki Perangkat Daerah Kota Bima berjumlah 34, dengan rincian sesuai tabel 1.7 dan 1.8 berikut:

Tabel 1.7
Daftar Perangkat Daerah

Staf Ahli Walikota	Sekretariat Daerah	Sekretariat DPRD	Inspektorat	Badan-Badan Daerah	Dinas-Dinas Daerah	Kecamatan
1. Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik. 2. Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. 3. Staf Ahli Walikota Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kemasyarakatan dan SDM.	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial a. Bagian Administrasi Pemerintahan. b. Bagian Kesejahteraan Rakyat. c. Bagian Hukum 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan a. Bagian Perekonomian. b. Bagian APP. c. Bagian LPBJ.	1. Bagian Hukum dan Persidangan. 2. Bagian Umum, Humas dan Protokol. 3. Bagian Keuangan.	1. Sekretaris 2. Inspektat	1. BAPPEDA dan LITBANG 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Badan Kepegawaian dan PSDM 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Satpol PP 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4. Dinas Kesehatan 5. Dinas PU dan Penataan Ruang 6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 7. Dinas Sosial 8. Dinas Tenaga Kerja 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA 10. Dinas Ketahanan Pangan 11. Dinas Lingkungan Hidup 12. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 13. Dinas Perhubungan	1. Kecamatan Asakota 2. Kecamatan Rasanae Barat 3. Kecamatan Mpunda 4. Kecamatan Rasanae Timur 5. Kecamatan Raba

Staf Ahli Walikota	Sekretariat Daerah	Sekretariat DPRD	Inspektorat	Badan-Badan Daerah	Dinas-Dinas Daerah	Kecamatan
	3. Asisten Administrasi Umum a. Bagian Organisasi. b. Bagian Umum. c. Bagian Humas dan Protokol.				14. Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik 15. Dinas Koperindag 16. Dinas Penanaman Modal dan PTSP 17. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 18. Dinas Kelautan dan Perikanan 19. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 20. Dinas Pertanian 21. Dinas Pemadam Kebakaran	

Tabel 1.8

Daftar Kelurahan Menurut Kecamatan Lingkup Pemerintah Kota Bima Tahun 2021

Kecamatan Asakota	Kecamatan RasanaE Barat	Kecamatan RasanaE Timur	Kecamatan Mpunda	Kecamatan Raba
1. Kelurahan Jatibaru 2. Kelurahan Kolo 3. Kelurahan Jatiwangi 4. Kelurahan Jatibaru Timur 5. Kelurahan Melayu 6. Kelurahan Ule	1. Kelurahan Dara 2. Kelurahan NaE 3. Kelurahan Pane 4. Kelurahan Paruga 5. Kelurahan Sarae 6. Kelurahan Tanjung	1. Kelurahan Dodu 2. Kelurahan Kodo 3. Kelurahan Kumbe 4. Kelurahan Lampe 5. Kelurahan Lelamase 6. Kelurahan Nungga 7. Kelurahan Oi Fo'o 8. Kelurahan Oimbo	1. Kelurahan Lewirato 2. Kelurahan Mande 3. Kelurahan Manggemaci 4. Kelurahan Matakando 5. Kelurahan Monggonao 6. Kelurahan SambinaE 7. Kelurahan Santi 8. Kelurahan Panggi 9. Kelurahan Sadia 10. Kelurahan Penatoi	1. Kelurahan Kendo 2. Kelurahan PenanaE 3. Kelurahan Penaraga 4. Kelurahan Rabadompu Timur 5. Kelurahan Rabadompu Barat 6. Kelurahan Rabangodu Selatan 7. Kelurahan Rabangodu Utara 8. Kelurahan Rite 9. KelurahanRontu 10. Kelurahan Nitu 11. Kelurahan Ntobo

c. SDM Aparatur

Dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan mempermudah pelaksanaan pelayanan publik saat ini Pemerintah Kota Bima Tahun 2021 telah memiliki PNS sebanyak 3.619 (*Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Belas*) orang, dengan rincian sebagaimana grafik 1.1 berikut.

Grafik 1.1
Jumlah PNS Lingkup Pemerintah Kota Bima Tahun 2021

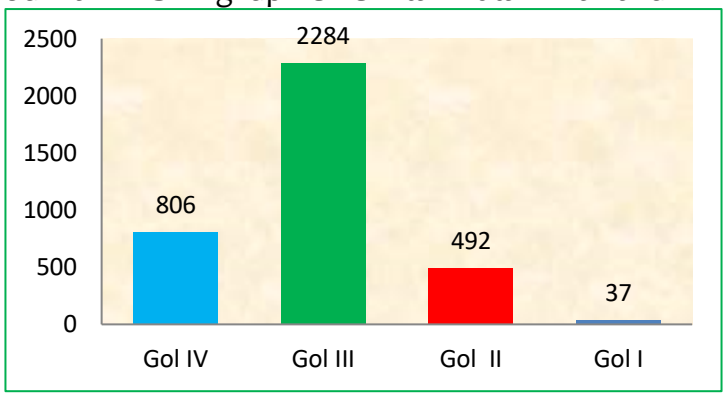

d. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Bima telah berjalan secara lancar, dengan tingkat capaian sasaran pada masing-masing indikator sebagaimana pada tabel 1.9 berikut.

Tabel 1.9
Capaian Sasaran Reformasi Birokrasi

Sasaran Reformasi Birokrasi	Indikator	Baseline (2019)	Target (2024)
1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.	a. Opini WTP atas laporan keuangan.	WTP	WTP
	b. Level kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).	III	IV
	c. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP.	II	IV
	d. Instansi pemerintah yang akuntabel (Skor B atas SAKIP).	B (67,05)	A (85,00)

Sasaran Reformasi Birokrasi	Indikator	Baseline (2019)	Target (2024)
	e. Penggunaan *e-Procurement* terhadap belanja pengadaan barang dan jasa melalui Sistem pengadaan secara elektronik (SPSE).	99 %	100 %
2. Birokrasi yang Efektif dan Efisien	a. Indeks Reformasi Birokrasi	-	-
	b. Indeks Profesionalitas ASN	-	-
	c. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	C (2,6)	A (3,0)
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.	a. Indeks kepuasan masyarakat	B 77,54	A (88,50)
	b. Persentase kepatuhan pelaksaaan peraturan perundang-undangan terkait pelayanan publik (Zona Hijau).	89,43	95
	c. Indeks Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sangat Tinggi (3,1845)	Sangat Tinggi (3,2300)
	c. Indeks inovasi daerah	Inovatif 890	Sangat Inovatif 1500

6. Pertumbuhan ekonomi Kota Bima

Perekonomian Kota Bima ditunjang dari berbagai sektor, diantaranya jasa, perdagangan, pertanian dan pariwisata. Kota Bima merupakan satu-satunya kota di Pulau Sumbawa Provinsi NTB. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bima pada Tahun 2021 yaitu sebesar 2,08 persen, dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi NTB yang sebesar 2,30 persen dan Nasional sebesar 3,51 persen.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bima

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan salah satu indikator yang menghitung jumlah nilai tambah yang terjadi diseluruh sektor ekonomi yang beroperasi pada periode tertentu di suatu wilayah. Dalam hal ini angka PDRB tersedia atas dasar harga berlaku dan juga atas dasar harga konstan. Di tahun 2020 besaran nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga berlaku telah mencapai 4.134 milyar rupiah.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Bima pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan. Peranan dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor yaitu mencapai 24,66 persen.

Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 14,06 persen, disusul oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,90 persen, Berikutnya lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,57 dan pendidikan sebesar 8,48 persen.

Dari distribusi tersebut terlihat bahwa sampai dengan tahun 2020 ini, perekonomian Kota Bima masih sangat tergantung pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sehingga apabila sektor ini

terganggu, akan berdampak besar terhadap perekonomian di Kota Bima.

b. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat stabilitas perekonomian suatu daerah dengan melihat perubahan harga barang/jasa yang umum dikonsumsi masyarakat. Tingkat inflasi/deflasi menggambarkan daya beli masyarakat. Semakin tinggi inflasi, maka semakin rendah nilai uang dan semakin rendah daya beli masyarakat. inflasi di Kota Bima di Kota Bima pada Tahun 2020 sebesar 0,64 dan inflasi di Kota Bima kondisinya lebih tinggi dari inflasi Provinsi NTB dan Inflasi Nasional.

7. **Potensi Unggulan Daerah**

a. Pertanian

Sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam perekonomian Kota Bima serta masih menjadi salah satu mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk di Kota Bima. Peranan sektor pertanian di Kota Bima masih cukup penting, karena kontribusinya dalam pembentukan PDRB menempati posisi kedua terbesar, yakni mencapai angka 14,06 persen pada tahun 2020.

Komoditas pertanian yang utama di Kota Bima meliputi padi, jagung, kacang kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ubi-ubian. Wilayah pertanian di Kota Bima terkonsentrasi di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Raba dan Rasanae Timur. Lahan pertanian di dua kecamatan ini masih luas dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

b. Perdagangan

Sektor perdagangan memiliki posisi penting dalam perekonomian Kota Bima. Kegiatan perdagangan di Kota Bima tidak hanya melayani kebutuhan penduduk lokal, tapi juga bagi penduduk wilayah sekitarnya. Ketersediaan infrastruktur yang menunjang sektor perdagangan, seperti pelabuhan dan pusat perdagangan menjadikan Kota Bima menjadi pusat arus distribusi barang dan jasa. Adapun perkembangan perusahaan perdagangan di Kota Bima menunjukkan tren yang cukup menggembirakan.

Banyaknya jumlah usaha industri di Kota Bima tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk menginvestasikan dananya. Di Kota Bima, usaha industry pengolahan dikelompokan menurut jenis industrinya. Adapun kelompok sentra yang dimaksud diantaranya adalah industri

pengolahan pangan, industry tekstil, industri barang galian bukan logam, industri pengolahan kayu dan lain-lain. Pada tahun 2020, total usaha industri rumah tangga di Kota Bima mencapai 2.924 usaha.

Pada tahun 2020, jenis industry rumah tangga terbanyak di Kota Bima adalah industri pengolahan pangan. Jumlah usaha jenis industri ini mencapai 1.289 usaha atau 44 persen dari total usaha industri rumah tangga yang ada di Kota Bima pada tahun 2020. Walaupun industri pengolahan pangan menjadi industri dengan jumlah usaha terbanyak, namun industri tekstil yang justru menyerap tenaga kerja lebih banyak yang yangan mana industri tekstil mampu menyerap tenaga kerja tertinggi, yang mencapai 3.180 orang, kemudian disusul oleh industri pengolahan pangan 2.582 orang. Sedangkan industri lainnya hanya menyerap tenaga kerja yang tidak begitu signifikan.

Kawasan perdagangan di Kota Bima terdapat di Kecamatan Rasanae Barat, di mana di kawasan ini terdapat Pasar Raya, dan kawasan pertokoan. Skala pelayanan kawasan perdagangan di Kecamatan Rasanae Barat adalah skala regional. Selain itu kawasan perdagangan juga terdapat di Kecamatan Raba, yaitu dengan adanya Pasar Raba, Pasar

Penaraga dan Pasar Kumbe. Kemudian di Kecamatan Asakota terdapat Pasar Jatibaru, namun skala pelayanannya masih lokal dan terbatas pada wilayah sekitar pasar tersebut.

c. Pariwisata

Potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kota Bima meliputi wisata budaya dan wisata alam. Namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, di mana saat ini masih terbatas pada wisatawan lokal. Jika dilihat secara geografis, posisi Kota Bima berada di antara dua kawasan yang menjadi tujuan wisata, yaitu Pulau Lombok di sebelah barat dan Pulau Komodo di sebelah timur. Sehingga secara geografis Kota Bima sangat berpotensi untuk mengembangkan sektor pariwisatanya mengingat letak wilayah yang cukup strategis. Beberapa obyek wisata yang ada di Kota Bima secara sekilas dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Istana Kayu *Asi Bou*

Istana ini terletak di samping timur Istana Bima (sekarang Museum *Asi Mbojo*). Dinamakan Asi Bou karena didirikan setelah pendirian Istana Bima pada tahun 1927, tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Ibrahim (1881-1936). *Asi*

Bou dibangun untuk Putera Mahkota Muhammad Salahuddin.

2) Museum Asi Mbojo

Museum Asi Mbojo dulunya merupakan Istana bagi Raja dan Sultan Bima. Museum ini dikonstruksi dengan campuran gaya Eropa dan Bima pada tahun 1927 oleh Mr.Obzicshteer Rehata. Lokasinya berada di pusat kota dan mudah diakses. Di Museum ini terdapat silsilah/tata urutan Raja dan Kesultanan Bima, benda tata urutan kepangkatan kepemerintahan, barang-barang serta pakain adat yang digunakan Istana Kerajaan, para prajurit serta masyarakat pada jaman itu. Selain itu juga dipamerkan benda-benda yang tidak hanya berasal dari jaman kerajaan dan kesultanan, tetapi juga benda-benda purbakala sebelum masa kerajaan dan kesultanan Bima.

3) Museum *Samparaja*

Museum ini terletak di Jalan Gajah Mada Kelurahan Moggonao Kota Bima. Koleksi yang ada di museum ini antara lain Kitab BO yang asli, kitab yang membahas ihwal Kerajaan Bima pada abad 14 Masehi. Selain itu terdapat benda-benda peninggalan kesultanan Bima.

4) Pantai Lawata

Pantai Lawata merupakan salah satu tempat tujuan wisata utama bagi masyarakat Kota Bima. Di kawasan pantai ini pengunjung dapat menikmati berbagai makanan khas Kota Bima dan melakukan aktifitas olahraga seperti berenang.

5) Pantai Amahami

Pantai Amahami juga merupakan tempat tujuan bagi masyarakat Kota Bima untuk berwisata. Kawasan pantai ini ramai terutama pada sore dan malam hari, dengan berbagai aktifitas yang ada seperti pedagang kaki lima. Pantai ini berdekatan dengan Pantai Lawata atau berada sebelum Pantai Lawata dari arah Terminal Dara. Selain pantai-pantai tersebut, di kawasan pesisir Teluk Bima masih terdapat obyek-obyek wisata yang menarik untuk dikunjungi, seperti Pantai Kolo dan Pantai So Ati.

6) Pantai Kolo

Pantai ini terletak di kawasan Perairan Kolo. Kapal–kapal laut yang hendak menuju Pelabuhan Bima harus melalui Perairan Kolo yang merupakan satu–satunya pintu masuk menuju pelabuhan Bima. Selain ramai dikunjungi para

pelancong, pantai ini juga menawarkan panorama dan keindahan a l a m n y a .

C. Isu Strategis Jangka Menengah

Berdasarkan isu-isu strategis pembangunan Kota Bima yang menjadi perhatian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut.

1. Isu strategis tentang peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat.

   Peningkatan kualitas melalui pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan pendapatan penduduk. Isu strategis pada bidang kesehatan meliputi: kasus gizi buruk, kesehatan Ibu hamil, kesehatan Ibu melahirkan, kesehatan bayi, *stunting*, kualitas pelayanan berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana, kesehatan, keterbatasan dokter spesialis dan tenaga kesehatan yang berkompeten. Sedangkan isu strategis pada bidang pendidikan meliputi: keterjangkauan pelayanan pendidikan yang berkaitan dengan akses dan pembiayaan, Pendidikan Anak Usia Dini, penuntasan pendidikan dasar, dan peningkatan tata kelola layanan lembaga pendidikan.

2. Isu strategis tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi.

   Peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat berkaitan erat dengan persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan harus dipandang sebagai kondisi yang tidak saja berkaitan dengan

ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar, perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani hidupnya secara bermartabat. Pada aspek pembangunan ekonomi, meskipun menunjukan pertumbuhan setiap tahunnya, sektor-sektor unggulan dan produktif belum berkembang dan memberikan nilai tambah secara optimal pada pendapatan masyarakat. Sektor pariwisata maupun industri kreatif pada dasarnya sangat potensial untuk dikembangkan mengingat kekayaan budaya maupun komoditi produk unggulan yang kita miliki.

3. Isu strategis tentang peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

   Isu tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Bima mencakup: perencanaan kinerja yang berkualitas, kualitas pengawasan dan kapabilitas APIP, akuntabilitas kinerja dan keuangan, peningkatan kapasitas dan profesionalisme ASN, peningkatan kualitas pelayanan publik (perijinan, administrasi kependudukan, kesehatan dan pendidikan).

4. Isu pembangunan Infrastruktur perkotaan dan penataan ruang yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana.

   Beberapa isu strategis pada aspek ini meliputi: kemantapan jalan dan jembatan, pelayanan air bersih, *backlog* perumahan, penuntasan kawasan kumuh, kesenjangan pembangunan wilayah timur dan barat,

ketaatan terhadap RTRW dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Pelayanan informasi rawan bencana, dan ketangguhan wilayah terhadap resiko bencana.

5. Isu strategis tentang eksistensi masyarakat berkarakter dan agamais.

   Pembangunan masyarakat berkarakter berkaitan erat dengan penerapan tradisi dan budaya serta kearifan lokal di Kota Bima. Falsafah hidup masyarakat Bima yang sampai saat ini bahkan telah menjad motto pemerintah Kota Bima yaitu *Maja Labo Dahu*. Falsafah hidup ini selalu menjadi nasehat atau amanat orang-orang tua terhadap anaka-naknya yang pergi merantau ke luar daerah. *Maja Labo Dahu* diartikan sebagai *Malu* dan *Takut* (*Maja* = Malu; *Dahu* = Takut). Merujuk pada kitab BO kesultanan Bima, *maja labo dahu* berarti malu untuk berbuat hal-hal yang diluar batas norma susila dan takut untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama.

6. Isu strategis yang terkait dengan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, meliputi: indeks pemberdayaan gender relatif masih rendah, pencegahan dan penuntasan kasus Kekerasan kepada perempuan dan anak.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

1. Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka pembangunan strategis Kota Bima untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai dokumen yang memuat penjabaran visi, misi dan program Pemerintah Kota Bima. RPJMD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memerhatikan RPJP dan RPJM Nasional. Untuk periode 2018-2023 RPJMD Kota Bima disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023, selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023

Pemerintah Kota Bima telah menetapkan visi Pembangunan Kota Bima Tahun 2018-2023 yaitu ***"Mewujudkan Kota Bima yang Berkualitas dan Setara menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri".***

Adapun penjelasan mengenai substansi Visi tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Perumusan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
"Mewujudkan Kota Bima yang Berkualitas dan Setara menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri"	Kota Bima yang Berkualitas	Terbentuknya suatu komunitas yang mampu berfikir secara komperhensip dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan. Masyarakat yang berkualitas dapat dilihat dari beberapa aspek penting, yakni aspek fisik/jasmani, aspek psikis dan intelektual serta aspek kultural.
	Masyarakat Sejahtera	Suatu kondisi dimana taraf hidup masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan dari keadaan sebelumnya. Dalam perseptif ekonomi kondisi ini dapat dicapai dengan mengupayakan peningkatan ekonomi produktif dan pemerataan pembangunan serta Keadilan sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal
	Transparan	keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah
	Akuntabilitas	proses pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic
	Lingkungan Perkotaan yang Ramah	lingkungan Kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah
	Masyarakat Agamais	masyarakat yang bertaqwa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama

Sumber : RPJMD Kota Bima 2019-2023.

Untuk mewujudkan tercapainya visi tersebut, maka dijabarkan dalam 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kota Bima sebagai berikut :

1) Mewujudkan masyarakat berkualitas yang berdaya saing;
2) Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis pengembangan produk unggulan;
3) Menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
4) Mewujudkan lingkungan yang berkualitas dan ramah, melalui penyediaan infrastruktur pendukung perkotaan yang terintegrasi dengan pengurangan Resiko bencana;
5) Mewujudkan masyarakat yang berkarakter dan agamais.

Adapun penjelasan substansi misi tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Perumusan Penjelasan Misi

Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
Kota Bima yang Berkualitas	Misi Pertama : *Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing*	Mewujudkan suatu kondisi masyarakat baik secara kolektif maupun individual memiliki wawasan yang luas, cara berfikir komperhensip dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan.
Masyarakat Sejahtera	*Misi Kedua :* Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan	- Adanya peningkatan kondisi kesejahteraan masyarakat secara signifikan yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi daerah yang meningkat disertai dengan pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah. selain itu juga dengan memberikan keberpihakan/affirmatif dalam peningkatan ekonomi khususnya kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal. - Peningkatan ekonomi masyarakat akan berbasis pada potensi produk unggulan yang ada di Kota Bima baik di sektor pertanian maupun non

Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
		pertanian, yang pada pengembangannya dapat memberikan lapangan kerja baru dan nilai tambah ekonomi;
Transparan	*Misi Ketiga :* Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.	Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui pelaksanaan tahapan-tahapan reformasi birokrasi sehingga akan meningkatkan Efektifitas capaian hasil pembangunan, Efisiensi dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan, serta membuka ruang Partisipasi masyarakat dan swasta dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
Akuntabilitas		
Lingkungan Perkotaan yang Ramah	*Misi Keempat:* Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana	Terwujudnya lingkungan Kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah. Sehubungan dengan wilayah administrasi Kota Bima yang masih memiliki potensi terjadinya bencana terutama bencana banjir, maka Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan akan difokuskan terintegrasi dengan upaya pengurangan risiko bencana;
Masyarakat Agamais	*Misi Kelima :* Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan Agamais	Terwujudnya masyarakat yang memiliki keimanan dan ketqwaan yang baik, mematuhi aturan hukum negara dan agama, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama serta memiliki karakter individu dan komunitas yang bercirikan nilai agama melalui pemahaman dan pengamalan yang benar dan baik.

Sumber : RPJMD Kota Bima 2019-2023.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut dirumuskan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bima 2018-2023 dan

menetapkan sebanyak 6 (enam) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran sebagaimana terlihat pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bima

Tujuan	Sasaran
Misi Pertama : Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing;	
Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan
	Meningkatnya Daya Beli masyarakat
	Meningkatnya ketahanan pangan
Misi Kedua : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan	
Meningkatkan pemerataan Ekonomi masyarakat	Meningkatknya pertumbuhan ekonomi
	Menurunnya angka kemiskinan
	Meningkatnya kesempatan kerja
Misi Ketiga : Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.	
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan
	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Misi Keempat: Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana	
Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dan tata ruang	Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang
	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup
Meningkatkan kualitas infrastruktur dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah
	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana
Misi Kelima : Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan Agamais	
Meningkatkan masyarakat yang tentram, bermoral dan agamais	Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban
	Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal
	Meningkatnya pengamalan ajaran agama

B. Prioritas Daerah

Program pembangunan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023. Untuk itu di rumuskan Prioritas Pembangunan Kota Bima sebagai berikut:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
4. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5. Peningkatan Ekonomi Masyarakat
6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
7. Pemantapan Infrastruktur dan Perumahan Rakyat
8. Penanggulangan Bencana (PRB)
9. Budaya dan Kearifan Lokal berbasis nilai-nilai agama

C. Indikator Kinerja Utama Kota Bima

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja

Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

Pelaksanaan reviu terhadap sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Bima dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan terutama indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kota Bima telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Bima Nomor : 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 51 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Bima Tahun 2019-2023, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2019-2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur
2.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Angka Partisipasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Wajib Belajar ditentukan oleh Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). $APK = \frac{\text{Jumlah penduduk dari berbagai usia yang bersekolah (SD dan SMP)}}{\text{Jumlah Penduduk kelompok usia 7-15 tahun (wajib pendidikan dasa)r}} \times 100$ Penjelasan : a. APK : Angka Partisipasi Kasar b. Tujuan APK dalam rangka mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. $APM = \frac{\text{Jumlah siswa usia 7-15 tahun yang bersekolah (SD dan SMP)}}{\text{Jumlah Penduduk kelompok usia 7-15 tahun}} \times 100$ Penjelasan : a. APM : Angka Partisipasi Murni b. Siswa usia sekolah adalah jumlah siswa yang sedang sekolah sesuai jenjang pendidikan dasar. c. Penduduk usia sekolah adalah penduduk yang wajib sekolah selama setahun pada jenjang pendidikan dasar. d. Tujuan APM dalam rangka mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai.
		Persentase peningkatan mutu pendidikan	$= \frac{\text{Mutu Pendidikan Tahun (n) – Mutu Pendidikan Tahun (n-1)}}{\text{Mutu Pendidikan Tahun (n)}} \times 100$ Penjelasan : Mutu pendidikan diukur dari komponen dengan bobot yang sama yaitu: (1) jumlah siswa berprestasi di tingkat provinsi dan nasional, (2) jumlah guru bersertifikat dan berprestasi tingkat provinsi dan nasional, dan (3) jumlah sekolah berakreditasi minimal B.
3.	Meningkatnya Daya Beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	$= \frac{\text{Total Pengeluaran Rumah Tangga}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100$ Penjelasan : a. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

			b. Pengeluaran adalah biaya yang dikeluarkan oleh seluruh anggota rumah tangga selama sebulan. c. Rumah Tangga adalah adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur.
4.	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan harapan	$$Y(j) = \sum_{i=1}^{9} a_i X_{ij}$$ Penjelasan : i : Indikator ke 1,2,3,….7,8 dan 9 j : Kabupaten ke 1,2,3,….414,415 dan 416; kota ke 1,2,3…96,97, dan 98 Yi : Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota ke-j ai : Bobot masing-masing indikator ke – j Xij : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupetn/kota ke-j
5.	Meningkatknya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB	Angka pertumbuhan PDRB diterbitkan oleh Badan pusat Statistik (BPS) secara rutin setiap tahun. Penjelasan : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. a. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. b. PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.
6.	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Tahun n}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$$ Penjelasan : a. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 14 kriteria masyarakat miskin antara lain : 1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang 2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan 3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.

			4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain. 5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan. 7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah 8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu. 9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun 10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari 11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik 12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan 13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD. 14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.
7.	Meningkatnya kesempatan kerja	Angka Pengangguran terbuka	$= \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$ **Penjelasan :** a. Pengangguran adalah jumlah penduduk berusia 15 tahun atau lebih yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari atau mempersiapkan pekerjaan, dan penduduk usia 15 tahun atau lebih yang telah memiliki pekerjaan, tetapi belum memulai bekerja. b. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
8.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP adalah hasil penilaian dari jumlah komponen-komponen yang digunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi. **Penjelasan :** 1. Komponen penilaian, antara lain perencanaan kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (25 %), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Internal (10%), Capaian Kinerja (20%) 2. Kriteria penilaian sebagai berikut: a. > 90 – 100 : Sangat Memuaskan (AA) b. > 80 – 90 : Memuaskan (A) c. > 70 – 80 : Sangat Baik (BB) d. > 60 – 70 : Baik (B) e. > 50 – 60 : Cukup (CC) f. > 30 – 50 : Kurang (C) g. > 0 – 30 : Kurang (D)

		Skor LPPD	Hasil Penilaian Kementerian Dalam Negeri R I terhadap Pemerintah Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada pemerintah pusat, dengan kriteria prestasi capaian kinerja: a. Skor 3 < ST ≥ 4 : Sangat Tinggi (ST) b. Skor 3 < ST ≥ 4 : Tinggi (T) c. Skor 3 < ST ≥ 4 : Sedang (S) d. Skor 3 < ST ≥ 4 : Rendah (R)
		Opini BPK	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah. BPK dapat memberikan opini dengan memperhatikan penilaian terhadap berbagai komponen, antara lain; (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Opini BPK terdapat 4 (empat) kriteria, antara lain ; a. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified Opinion); b. Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified Opinion; c. Tidak Memberikan Pendapat (TMT/Disclaimer Opinion); d. Tidak Wajar (TW/Adverse Opinion).
9.	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio PAD terhadap APBD	$= \frac{\text{Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setahun}}{\text{Jumlah APBD Setahun}} \times 100$ Penjelasan : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. b. APBD adalah anggaran pendapatan belanja daerah selama satu tahun.
10.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Rata-rata IKM} = \frac{\text{Komulatif IKM unit Pelayanan}}{\text{Jumlah Unit Pelayanan}}$ Penjelasan : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM adalah hasil pengukuran dari Survei Kepuasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik, khususnya pada 9 unsur pelayanan, diantaranya; a. Persyaratan b. Prosedur c. Waktu pelayanan d. Biaya/tarif e. Produk layanan f. Kompetensi pelaksanaan g. Penanganan pengaduan, saran dan masukan h. Sarana dan prasarana

			2. Kriteria penilaian, sebagai berikut; a. 25,00 – 66,99 : Sangat Baik (A) b. 65,00 – 76,60 : Baik (B) c. 76,61 – 88,30 : Kurang Baik (C) d. 88,31 – 100 : Tidak Baik (D) 3. Unit Pelayanan adalah Perangkat Daerah yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
11.	Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	Angka perhitungan dari hasil overlay peta land use pada tahun berkenaan terhadap peta rencana pola ruang. Berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa untuk dapat mengefektifkan pelaksanaannya, diperlukan suatu aturan Pola Pemanfaatan Ruang (Zoning Regulation) sebagai alat operasional rencana tata ruang. Pola Pemanfaatan Ruang tersebut berfungsi sebagai acuan untuk mengontrol setiap pembangunan atau pemanfaatan lahan di wilayah yang bersangkutan.
12.	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	IKLH = (IPA x 30%) + (IPU x 30 %) + (ITH x 40 %) Dimana: IKLH= Indeks kualitas lingkungan hidup IPA = Indeks kualitas air IPU = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks tutupan hutan
13.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik	Infrastruktur dalam kondisi baik tahun n-1 – Infrastruktur dalam kondisi baik tahun n-1 = ---------- x 100 Infrastruktur dalam kondisi baik tahun n-1 Penjelasan : a. Infrastruktur adalah seluruh fasilitas untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan dasa, baik fisik dan sosial untuk pelayanan publik, seperti jalan raya, jembatan, drainase, air bersih, limbah, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya. b. kondisi baik adalah terpeli.
14.	Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Pelaksanaan penilaian Indeks Ketahanan Daerah dilaksanakan
15.	Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban	Persentase penurunan Angka kriminalitas	Angka Kriminalitas Tahun (n-1) – Angka Kriminalitas Tahun (n) = ---------- x 100 Angka Kriminalitas Tahun (n-1) Penjelasan : a. Kriminalitas adalah perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia. b. Tahun (n-1) adalah satu tahun sebelumnya; c. Tahun n adalah tahun terjadinya kriminalitas.
		Persentase penurunan Angka Konfllik Sosial	Konflik Soail Tahun (n-1) – Konflik Sosial Tahun (n) = ---------- x 100 Konflik Sosial Tahun (n-1)

			Penjelasan : a. Konflik Sosial adalah pertentangan kelompok masyarakat, baik suku, agama, ras dan antar golongan yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. b. Tahun (n-1) adalah satu tahun sebelumnya; c. Tahun n adalah tahun terjadinya konflik sosial.
16.	Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Persentase peningkatan nilai budaya, adat dan tradisi yang dibina	$= \frac{\text{Konflik Soail Tahun (n-1)} - \text{Konflik Sosial Tahun (n)}}{\text{Konflik Sosial Tahun (n-1)}} \times 100$ Penjelasan: a. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. b. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu kelompok. c. Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan. d. Pengertian "dibina" pada indikator ini adalah bentuk pendampingan berupa fasilitasi, publikasi, edukasi, advokasi maupun bantuan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah
17.	Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Indeks kerukunan umat beragama	Kerukunan Umat Beragama Kerukunan umat beragama adalah keadaan atau kondisi kehidupan umat beragama yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai, dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan beribadah masing-masing.

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bima Tahun 2019 mengacu pada dokumen RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021, dan

dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2021. Pemerintah Kota Bima telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagaimana terlihat pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bima Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka	69,55
2.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	102,11
3.	Meningkatnya Daya Beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	Rp.000/ bulan	1.500.000
4.	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan harapan	Angka	83,30
5.	Meningkatknya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB	%	5,1
6.	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	8,40
7.	Meningkatnya kesempatan kerja	Angka Pengangguran terbuka	%	3,85
8.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Huruf dan Angka	B (72,00)
		Skor LPPD	Angka	Sangat Tinggi (3,2100)
		Opini BPK	Huruf	WTP
9.	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio PAD terhadap APBD	%	6
10.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	B (86,00)
11.	Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Indeks Kesesuaian Tata Ruang	%	95
12.	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	85
13.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Persentase peningkatan infrastruktur daerah	%	51

		dalam kondisi baik		
14.	Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	Indeks Ketangguhan Daerah	Angka	86
15.	Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban	Persentase penurunan Angka kriminalitas	%	35
		Persentase penurunan Angka konflik sosial	-	16,7
16.	Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Persentase peningkatan nilai budaya, adat dan tradisi yang dibina	-	4,2
17.	Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Indeks kerukunan umat beragama Kota Bima	-	86

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Kota Bima selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban melaksanakan penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bima yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, IKU Tahun 2018-2023, RKPD Tahun 2021, dan PK Tahun 2021.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran Pemerintah Kota Bima. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Bima tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Skala nilai peringkat kinerja dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria
1.	91% ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2.	76 % ≤90 %	Tinggi
3.	66 % ≤75 %	Sedang
4.	51 % ≤65 %	Rendah
	≤50 %	Sangat Rendah

Sumber Permendagri 54 Tahun 2010

1. Target dan Realisasi Kinerja SasaranTahun 2021

Pada Tahun 2021 Pemerintah Kota Bima telah berusaha mewujudkan misi dan tujuannya melalui 16 sasaran dan 21 indikator kinerja dalam IKU maupun perjanjian kinerja tahun 2021. Kemudian telah dilakukan pengukuran kinerja sasaran sebagimana tersaji pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemerintah Kota Bima Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka	69,55	101	101
2.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Angka Partisipasi Jenjang Pendidikan Dasar	Angka	102,11	102	122
		Persentase Peningkatan Mutu Pendidikan	%	29,17	33	113
3.	Meningkatnya Daya Beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	Rp.000/ hari	Rp. 1.500.000	Rp. 1.718.519	115
4.	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	83,30	65,9	77

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
5.	Meningkatknya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB	%	5,1	2,08	41
6.	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	8,40	8,88	106
7.	Meningkatnya kesempatan kerja	Angka Pengangguran terbuka	%	3,85	3,56	92
8.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Huruf dan Angka	B (72,00)	B (68,48)	92
		Skor LPPD	Angka	Sangat Tinggi (3,2100)	Sangat Baik (3,2595)	102
		Opini BPK	Huruf	WTP	WTP	100
9.	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio PAD terhadap APBD	%	6	6,2	103
10.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	B (86,00)	B (83,42)	97
11.	Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Indeks Kesesuaian Tata Ruang	%	95	98,5	103
12.	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	85	52,73	62
13.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik	%	51	9,94	19
14.	Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	Indeks Ketangguhan Daerah	Angka	86	92,61	108

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
15.	Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban	Persentase penurunan Angka kriminalitas	%	35	66	-88
		Persentase penurunan Angka konflik sosial	%	16,7	57	341
16.	Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Persentase peningkatan nilai budaya, adat dan tradisi yang dibina	%	4,2	5,2	128
17.	Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Indeks kerukunan umat beragama Kota Bima	%	86	96,86	112
		Rata-rata				97

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Bima pada Tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam tabeL 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rekapitulasi Pencapaian Sasaran

No	Predikat Sasaran	Sasaran	%
1.	Sangat Tinggi	13	76,47
2.	Tinggi	1	5,88
3.	Sedang	0	0
4.	Rendah	1	5,88
5.	Sangat Rendah	2	11,76
	Jumlah	17	100

Berdasarkan hasil analisis tersebut bahwa pada Tahun 2021 jumlah sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 17 sasaran, dengan rata-rata capaian kinerja 97 % dengan predikat sangat tinggi.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sesuai RPJMD

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sesuai RPJMD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka	69,55	69,75	69,95	70,15	70,35	70,2	70,30	70,50		
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Angka Partisipasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar	%	98,5	99,29	99,79	100	100	12,69	12,75	102		
		Persentase Peningkatan Mutu Pendidikan	%	25,17	27,17	29,17	31,17	33,17	-	-	33		
3	Meningkatnya Daya Beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	Rp. 000 / bulan	1.200	1.300,00	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.399,041	1366,75	1.718.519		
4	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	83,3	84,3	85,3	86,3	87,3	85,5	85,70	65,9		
5	Meningkatkny a pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB	%	5,8	3	3,3	3,6	3,9	5,22	-4,95	2,08		
6	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	8,9	8,6	8,40			8,6	8,35	8,88		
7	Meningkatnya kesempatan kerja	Angka Pengangguran terbuka	%	4,5	4	3,85	3,7	3,55	4,18	4,42	3,56		
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggar aan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Huruf dan Angka	65,58	BB (70,01)	BB (72)	BB (75)	BB (80,01)	67,05	Belum rilis	B (68,48)		
		Skor LPPD	Angka	Sangat Tinggi (3,1930)	Sangat Tinggi (3,200)	Sangat Tinggi (3,2100)	Sangat Tinggi (3,2300)	Sangat Tinggi (3,2300)	Sangat Baik 3,2595	belum rilis	belum rilis		
		Opini BPK	Huruf	WTP	WTP	WTP			WTP	WTP	WTP		
9	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio PAD terhadap APBD	%	5,7	5,72	5,82	5,92	6,02	5,58	6,41	6,2		
10	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	84	85 (80,00)	86	87	88	82,36	82,61	83,42		

11	Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Indeks Kesesuaian Tata Ruang	%	95	98,3	98,5	98,7	98,9	98,1	98,10	Belum Rilis		
12	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	80	75	85			83,84	74,12	52,73		
13	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik	%	38,81	40	41	42	43	4,21	2,80	9,94		
14	Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	84	85	86	87	88	84	74,00	92,61		
15	Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban	Persentase penurunan Angka kriminalitas	%	25	30	35	40	45	67	-104,10	-88		
		Persentase penurunan Angka Konfllik Sosial		12,5	14,3	16,7	20	25	-	-	57		
16	Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Persentase peningkatan nilai budaya, adat dan tradisi yang dibina		2,1	3,2	4,2	5,3	6,3	-	-	5,4		
17	Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Indeks kerukunan umat beragama		84	85	86	87	88	95,67	96,28	96,89		

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Capain/Standar Provinsi NTB dan Nasional

Tabel 3. 6 Perbandingan realisasi Kinerja dengan Standar/Capaian Provinsi NTB dan Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Kota Bima	Capaian Provinsi NTB	Standar/ Capaian Nasional
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka	70,50	66,69	71,57
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Angka Partisipasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar	Indeks	102	-	-
		Persentase Peningkatan Mutu Pendidikan	%	33	-	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Kota Bima	Capaian Provinsi NTB	Standar/ Capaian Nasional
1	2	3	4	5	6	7
3	Meningkatnya Daya Beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	Rp.000 / bulan	1.718.519	-	-
4	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	65,9	75,67	-
5	Meningkatknya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB	%	2,08	2,30	3,51
6	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	8,88	14,14	9,71
7	Meningkatnya kesempatan kerja	Angka Pengangguran terbuka	%	3,01	3,01	6,49
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Huruf dan Angka	Belum rilis	Belum rilis	Belum rilis
		Skor LPPD	Angka	belum rilis	Belum rilis	Belum rilis
		Opini BPK	Huruf	WTP	WTP	-
9	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio PAD terhadap APBD	%	6,2	-	-
10	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,42	-	-
11	Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Indeks Kesesuaian Tata Ruang	%	99	-	-
12	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	52,73	-	-
13	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik	%	9,94	-	-
14	Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	92,61	-	-
15	Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban	Persentase penurunan Angka kriminalitas	%	66	-	-
		Persentase penurunan Angka Konfllik Sosial	%	57		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Kota Bima	Capaian Provinsi NTB	Standar/ Capaian Nasional
1	2	3	4	5	6	7
16	Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Persentase peningkatan nilai budaya, adat dan tradisi yang dibina	%	5,4		
17.	Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Indeks kerukunan umat beragama	Angka	96,89		

4. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

a. Sasaran 1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

1) Indikator kinerja yaitu Angka Harapan Hidup (AHH)

Indikator kinerja yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) dalam rangka mengukur sasaran 1 : meningkatnya derajat kesehatan masyarakat . Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Bima tahun 2021 sebesar 70,50, mengalami peningkatan sebesar 0,62 dibanding tahun 2020. Atas perolehan nilai tersebut, Pemerintah Kota Bima telah berhasil mencapai target kinerja sebesar 101 % dari target RPJMD.

AHH adalah angka perkiraan lama hidup penduduk yang lahir pada suatu daerah. Oleh karena itu AHH Kota Bima sebesar 70,50 memiliki arti bahwa setiap bayi yang lahir di Kota Bima pada tahun 2021 mempunyai harapan hidup hingga berusia 70 tahun dan 5 bulan. Adapun analisis pencapaian sasaran 1 dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 1

Sasaran Strategis 1	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	69,95	70,50	101

Kecederungan setiap tahun bahwa AHH Kota Bima selalu mengalami peningkatan dan unggul diatas AHH NTB. Pada tahun 2021 AHH Kota Bima unggul diatas AHH Provinsi NTB sebesar 3,81 poin sehingga anak yang lahir di Kota Bima pada tahun 2021 mempunyai harapan hidup tambahan 3 tahun 8 bulan dibanding penduduk yang ada di Provinsi NTB secara umum. Kondisi AHH Kota Bima setiap tahunnya tahun mengalami kenaikan harapan hidup setiap tahunnya bertambah 1 (satu) bulan, datanya dapat dilihat pada grafik berikut ini.Grafik berikut.

Grafik 3.1
Kondisi Angka Harapan Hidup Kota Bima

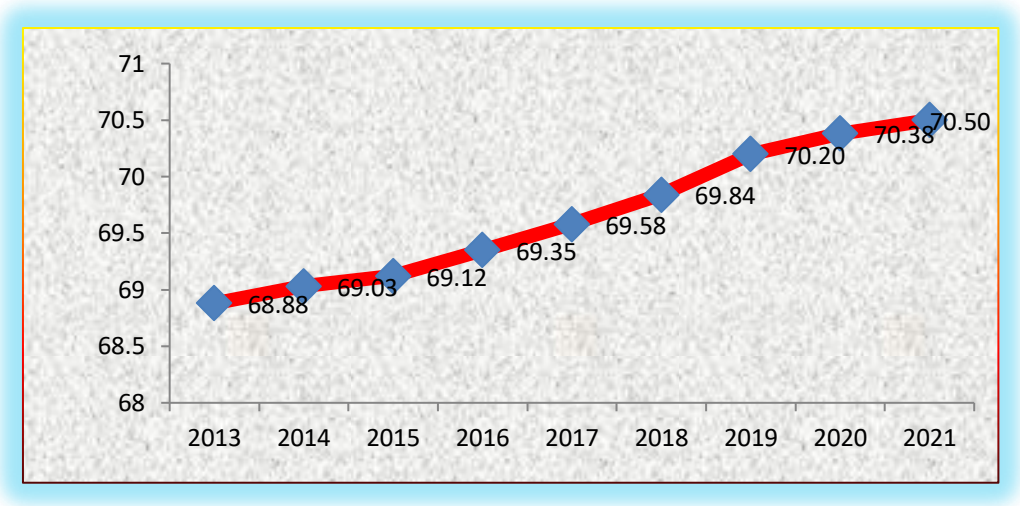

Grafik 3.1 diatas memperlihatkan kecenderungan peningkatan AHH Kota Bima dari tahun 2013 hingga 2021 setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Tingginya kesadaran masyarakat Kota Bima yang didukung oleh semakin membaiknya kemampuan ekonomi masyarakat serta didukung juga oleh peningkatan kualitas sarana kesehatan oleh Pemerintah dan masyarakat.

Kota Bima merupakan daerah yang memiliki AHH tertinggi kedua setelah Kota Mataram untuk seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Kemudian jika dibanding dengan AHH nasional bahwa AHH Kota Bima masih berada dibawah AHH nasional yang telah mencapai 71,57 atau selisih 1,07 poin. Secara rinci

perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Bima dengan Provinsi dan Nasional dapat dilihat grafik berikut.

Grafik 3.2
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Bima
dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2021

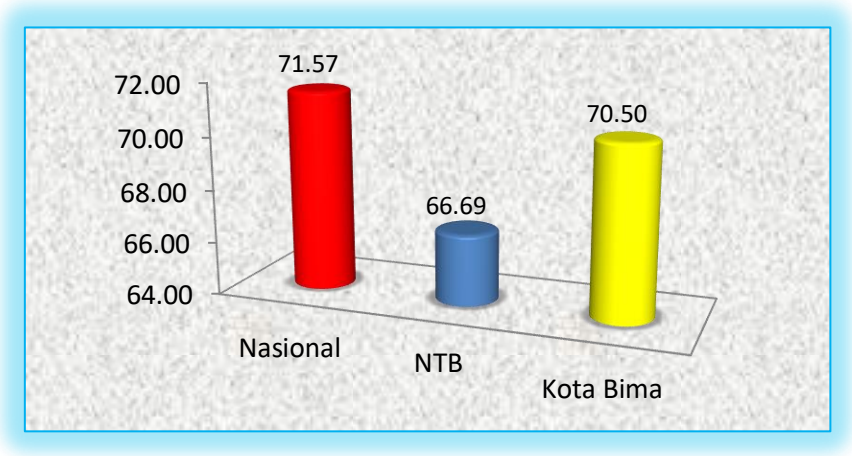

Faktor pendukung pencapaian kinerja, meliputi meningkatnya komitmen Pemerintah Kota Bima dalam mendorong program peningkatan pelayanan pada urusan kesehatan, baik peningkatan sarana dan prasarana, SDM, dan anggaran, sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** berupa masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan dan terbatasnya tenaga kesehatan (khususnya dokter spesialis). **Solusi** untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kedepannya melalui pengusulan formasi bagi dokter spesialis dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang ada pada RSUD maupun Puskesmas.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan.

Untuk mengukur sasaran 2 : meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan, diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu Angka Partisipasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajardikdas) dan Persentase Peningkatan Mutu Pendidikan.

1) Indikator Angka Partisipasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajardikdas)

Angka Partisipasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajardikdas) merupakan nilai rata-rata Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Sekolah di Kota Bima pada Tahun 2021 rata-rata sebesar 102,11 atau peningkatan 2,13 poin dibanding Tahun 2020. Atas perolehan tersebut, Pemerintah Kota Bima telah mampu mencapai kinerja sebesar 102 % dari RPJMD. Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran 2 dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 2

Indikator Kinerja	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)
	Target	Realisasi	
Angka Partisipasi	99,79	102,11	102

Adapun data rincian angka partisipasi, baik Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Angka Partisipasi Sekolah di Kota Bima Tahun 2021

Angka Partisipasi	Jenjang Pendidikan		Rata-rata
	SD	SMP	
Angka Partisipasi Kasar (APK)	108,94	100,07	104,50
Angka Partisipasi Murni (APM)	99,17	100,29	99,73
Rata-rata	104,05	100,18	102,11

2) Persentase Peningkatan Mutu Pendidikan

Untuk mengukur indikator persentase mutu pendidikan diukur dari komponen dengan bobot yang sama yaitu: (1) jumlah siswa berprestasi di tingkat provinsi dan nasional, (2) jumlah guru bersertifikat dan berprestasi tingkat provinsi dan nasional, dan (3) jumlah sekolah berakreditasi minimal B.

Secara umum capaian kinerja pada indikator Persentase Peningkatan Mutu Pendidikan telah mencapai kinerja sebesar 102 dari target RPJMD. Selanjutnya analisis pencapaian indikator kinerja sasaran 2 dapat dilihat tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 2

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	
	Persentase Peningkatan Mutu Pendidikan	29,17	33	113

Bahwa mutu pendidikan di Kota Bima mengalami peningkatan sebesar 33 persen dari Tahun 2020, sebagaimana terlihat data pada tabel berikut.

Tabel 3.11
Angka Partisipasi Sekolah di Kota Bima Tahun 2021

Tahun	Berprestasi Provinsi/Nasional		Jumlah
	Guru	Siswa	
2020	2	2	4
2021	6	0	6
Porsentase Peningkatan Mutu Pendidikan			33 %

Faktor pendukung pencapaian kinerja, meliputi meningkatnya komitmen kepala daerah dalam membangun pendidikan di daerah, baik sarana prasarana, SDM, anggaran, sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** berupa masih lemah kualitas SDM pendidikan dan sarana prasarana. **Solusi** untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar dan Angka

Partisipasi Murni, dan mutu pendidikan untuk kedepannya, perlu lagi meningkatkan SDM dan Sarana Prasarana Pendidikan.

c. **Sasaran 3 : Meningkatnya Daya Beli Masyarakat**

Untuk mengukur sasaran 3 : meningkatnya daya beli masyarakat, diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu Pengeluaran Perkapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung sebulan dan setahun terakhir. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan.

Angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk. Pengeluaran perkapita penduduk Kota Bima pada tahun 2021 sebesar Rp.1.718.519/bulan. Atas perolehan tersebut, maka Pemerintah Kota Bima telah mampu mencapai kinerja sebesar 115 % dari target sebesar Rp.1.500.000.-/bulan pada RPJMD. Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran 3 dapat dilihat tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.12
Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 3

Indikator	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	Rp.1.500.000	Rp.1.718.519	115

Pada tahun 2021, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Kota Bima diperoleh dari pengeluaran makanan sebesar Rp. 829.823 dan pengeluaran non makanan sebesar Rp.888.696. Atas kondisi tersebut, maka pengeluaran penduduk di Kota Bima tahun 2021 masih didominasi oleh konsumsi non makanan sebesar 51,71 %. Jika dibanding tahun 2020 pengeluaran perkapita penduduk Kota Bima meningkat, sebagaimana terlihat grafik 3.5 dan 3.6 berikut.

Grafik 3.2
Perbandingan Pengeluaran Perkapita/bulan
Penduduk Kota Bima dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2021

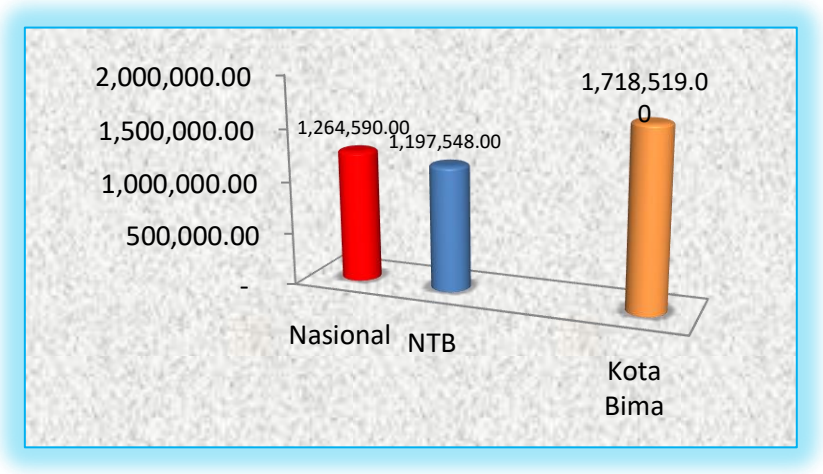

Berdasarkan grafik diatas bahwa pengeluaran perkapita/bulan penduduk Kota Bima sudah berada diatas rata-rata Provinsi dan rata-rata nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, maka kemampuan ekonomi penduduk Kota Bima jauh lebih baik dari penduduk NTB dan Indonesia secara umum.

Faktor pendukung pencapaian kinerja, meliputi meningkatnya kemajuan Kota Bima, terutama sektor perbankan, UMKM, dan jasa. sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** berupa masih belum optimalnya pengembangan produk unggulan daerah, terutama peningkatan kualitas dan promosi hasil olahan lokal sehingga produk unggulan daerah menjadi kalah bersaing dengan produk daerah lain. **Solusi** untuk meningkatkan nilai produk unggulan daerah adalah melalui peningkatan kualitas produk dan pemasaran yang lebih luas dengan menggunakan teknologi informasi.

d. **Sasaran 4 : Meningkatnya Ketahanan Pangan**

Untuk mengukur sasaran 4 : meningkatnya ketahanan pangan, diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu Indeks Ketahanan Pangan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan

dan gizi wilayah (kabupaten/kota/provinsi) dan peringkat (ranking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainya. IKP dapat menjadi salah satu alat untuk menentukan prioritas daerah menerima intervensi program penguatan ketahanan pangan. Nilai IKP merupakan bagian dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA). IKP tingkat Kabupaten/Kota/ Provinsi disusun oleh Badan Ketahanan Pangan.

Indikator Tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima yaitu "Indeks Ketahanan Pangan". Capaian Indikator Tujuan diukur dengan membandingkan realisasi tahun 2021 dengan target tahun 2021. Analisis capaian kinerja pada sasaran 4 ini, selanjutnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 4

Sasaran 4	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	85,3	65,9	77

Berdasarkan data tersebut bahwa capaian kinerja Pemerintah Kota terhadap sasaran 4 hanya mampu mencapai sebesar 77 persen dari target RPJMD. Indeks Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2021 mengalamai kenaikan sebesar 3,38 poin.

Selanjutnya perbandingan Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2020 dan 2021, sebagaimana terlihat pada grafik berikut.

Grafik 3.3
Indeks Ketahanan Pangan Kota Bima dan Provinsi
Tahun 2020-2021

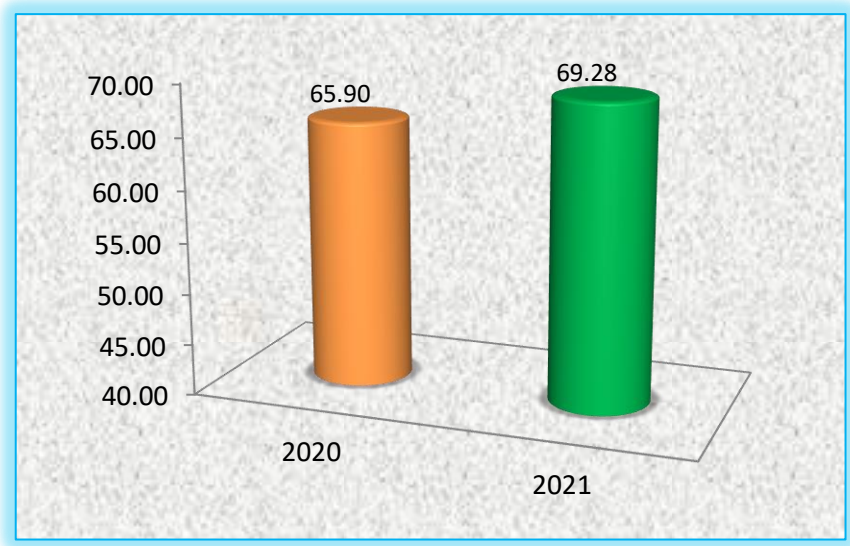

Jika dibanding dengan Indeks Ketahanan Daerah Provinsi NTB Tahun 2021 bahwa Indeks Ketahanan Daerah Kota Bima masih berada dibawah Provinsi NTB sebesar 6,38 poin, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14
Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 4

Indeks Ketahanan Pangan	Tahun		Kenaikan/P Penurunan (%)
	2020	2021	
Kota Bima	65,90	69,28	3,38
NTB	70,60	75,67	5,07
Selisih	-4,70	-6,38	

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah ketersediaan pangan dan tingkat distribusinya cukup merata. sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** berupa masih kurang tingkat keragaman ketersediaan pangan. **Solusi** untuk meningkatkan skor PPH diperlukan intervensi program edukasi dan promosi diversifikasi pangan, pemanfaatan pekarangan melalui Kelompok Rumah Pangan Lestari (KRPL).

e. Sasaran 5 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

Untuk mengukur sasaran 5 : meningkatnya pertumbuhan ekonomi, diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada ahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Pertumbuhan PDRB Kota Bima pada tahun 2021 sebesar 2,08. Atas perolehan tersebut, maka Pemerintah Kota Bima masih belum bisa mencapai target kinerja sebesar RPJMD Tahun 2021 sebesar 5,1, namun perolehan tersebut mengalami kenaikan

sebesar 7,03 poin dibanding pertumbuhan PDRB Tahun 2020 telah mengalami penurunan drastis karena covid-19 hingga mencapai angka terendah sebesar –4,95 poin, Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran 5 dapat dilihat tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.15
Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 5

Sasaran 5	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB	5,1	2,08	41

Grafik 3.4
Perbandingan Pengeluaran Perkapita/bulan
Penduduk Kota Bima Tahun 2017- 2021

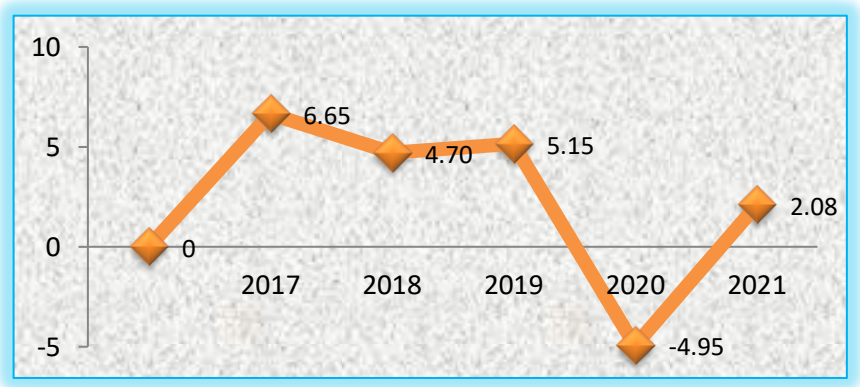

Grafik 3.5
Perbandingan Pertumbuhan PDRB Kota Bima Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2021

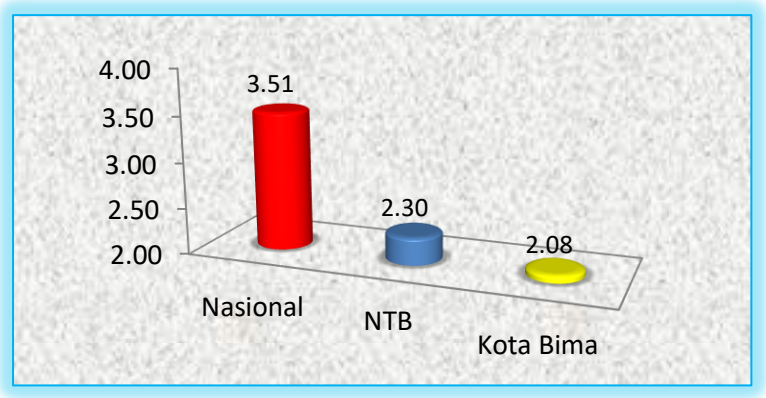

Berdasarkan analisis terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional bruto Atas Harga Konstan 2010 menurut lapangan usaha tahun 2021 bahwa pengadaan listrik dan gas merupakan yang tertinggi sebesar 7,56, sedangkan pertanian sebagai yang terendah dengan nilai sebesar 0,01. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.15
PDRB Usaha Atas Harga Konstan 2010
menurut lapangan usaha tahun 2021

No	Lapangan Usaha	Nilai
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/	0,01
2.	Pertambangan dan Penggalian/	1,32
3.	Industri Pengolahan	0,59
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	7,78
5.	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0.06
6.	Konstruksi	6,48
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,22

8.	Transportasi dan Pergudangan	1,38
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,38
10.	Informasi dan Komunikasi	5,16
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,02
12.	Real Estate	1,15
13.	Jasa Perusahaan	0,12
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,62
15.	Jasa Pendidikan	1,41
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/	5,71
17.	Jasa Lainnya/	1,67
	Produk Domestik Bruto	2,08

Faktor pendukung pencapaian kinerja, meliputi meningkatnya kemajuan Kota Bima, terutama sektor perbankan, UMKM, dan jasa. sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** berupa masih belum optimalnya pengembangan produk unggulan daerah, terutama peningkatan kualitas dan promosi hasil olahan lokal sehingga produk unggulan daerah menjadi kalah bersaing dengan produk daerah lain. **Solusi** untuk meningkatkan nilai produk unggulan daerah melalui pembinaan pelaku usaha, peningkatan kualitas produk dan pemasaran yang lebih luas dengan menggunakan teknologi informasi.

f. Sasaran 6 : Menurunnya angka kemiskinan

Untuk mengukur sasaran 6 : menurunnya angka kemiskinan, diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu angka kemiskinan. Berdasarkan data BPS yang dirilis September

2021 bahwa persentase penduduk miskin di Kota Bima sebesar 8,88 %. Persentase kemiskinan di Kota Bima mengalami kenaikan sebesar 0,53 %dibanding tahun 2020. Meski demikian Pemerintah Kota Bima tetap mampu mampu mencapai target kinerja RPJMD sebesar 107 % dari target sebesar 8,40 % atau mampu menurunkan angka kemiskinan melebihi target sebesar 0,48 % tahun 2021, analisis pencapaian indikator kinerja sasaran 6 dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 3.16
Analisis Pencapaian Sasaran 6

Sasaran 6	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	
Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	8,40	8,88	106 %

Saat ini persentase penduduk miskin Kota Bima merupakan yang terendah kedua setelah Kota Mataram jika dibandingkan seluruh kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat dan jika dibanding Provinsi NTB dan nasional, maka angka kemiskinan Kota Bima masih dibawah persentase kemiskinan NTB sebesar 14,14 persen dan nasional sebesar 0,83 %, sebagaimana tersaji pada grafik 3.9 berikut.

Grafik 3.6
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Bima
dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2021

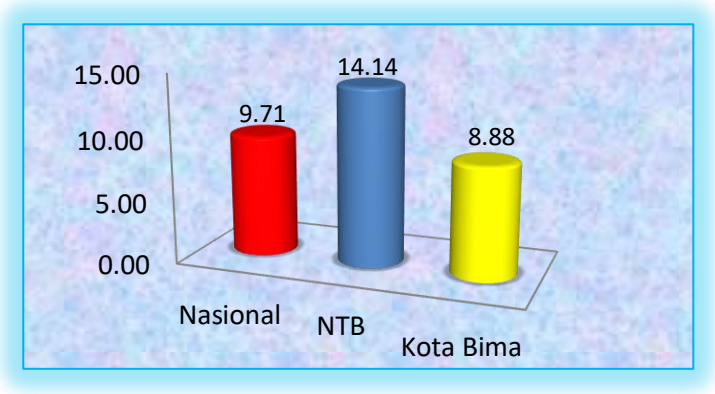

Selanjutnya apabila dilakukan perbandingan persentase penduduk miskin beberapa tahun sebelumnya, maka persentase penduduk miskin di Kota Bima sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2021, data perbandingan tersebut terlihat pada grafik 3.10 berikut ini.

Grafik 3.7
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin di Kota Bima
dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2015 – 2021

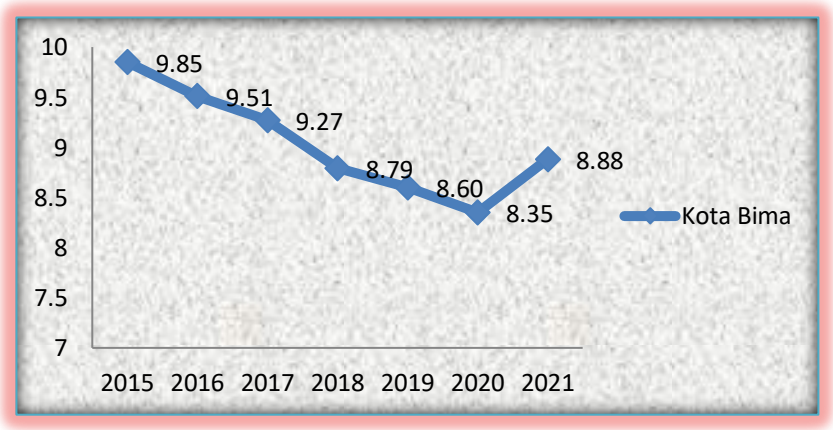

Faktor pendukung pencapaian kinerja, meliputi meningkatnya komitmen kepala daerah untuk melaksanakan program penanganan kemiskinan yang terintegrasi, baik perencanaan dan pelaksanaannya, sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** berupa masih lemah aspek koordinasi dalam pendataan dan verifikasi data kemiskinan di daerah sehingga menghambat pelayanan. **Solusi** untuk meningkatkan kualitas data yang valid diperlukan penyamaan persepsi antara Pemerintah Kota Bima dengan seluruh pihak yang terlibat (*stakeholders*) dalam penanggulangan kemiskinan di daerah.

g. Sasaran 7 : Tingkat Pengangguran Terbuka

Untuk mengukur sasaran 7 : meningkatnya kesempatan kerja, diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT menggambarkan perbandingan jumlah penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha dan penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja terhadap angkatan kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bima Tahun 2021 sebesar 3,56 persen. Jika dibanding Tahun 2020, maka Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bima mengalamai penurunan sebesar 0,55 %. Atas perolehan tersebut, maka Pemerintah Kota

Bima berhasil mencapai target kinerja sebesar 92 % dari target RPJMD sebesar 3,85 %. Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran 7 dapat dilihat tabel 3.12 berikut.

Tabel 3.17
Pencapaian Indikator Sasaran 7

Sasaran 7	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,85	3,56	92

Dengan melaksanakan analisa perbandingan dengan beberapa Kabupaten/Kota lainnya di NTB dapat dilihat pada grafik 3.11 . Pada Tahun 2021 bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bima merupakan yang tertinggi ketiga dari seluruh Kabupaten/Kota di NTB, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bima lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi NTB yakni sebesar 3,01 persen, namun masih berada dibawah rata-rata nasional dengan angka TPK sebesar 6,49 persen. Secara umum angka TPK di Kota Bima selama 5 (lima) Tahun dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.8
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bima
Tahun 2017 - 2021

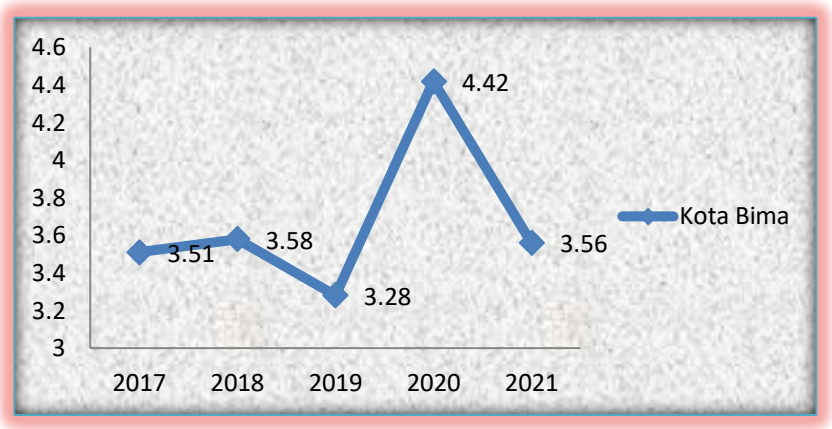

Grafik 3.9
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaaten/Kota,Provinsi dan Nasional Tahun 2021

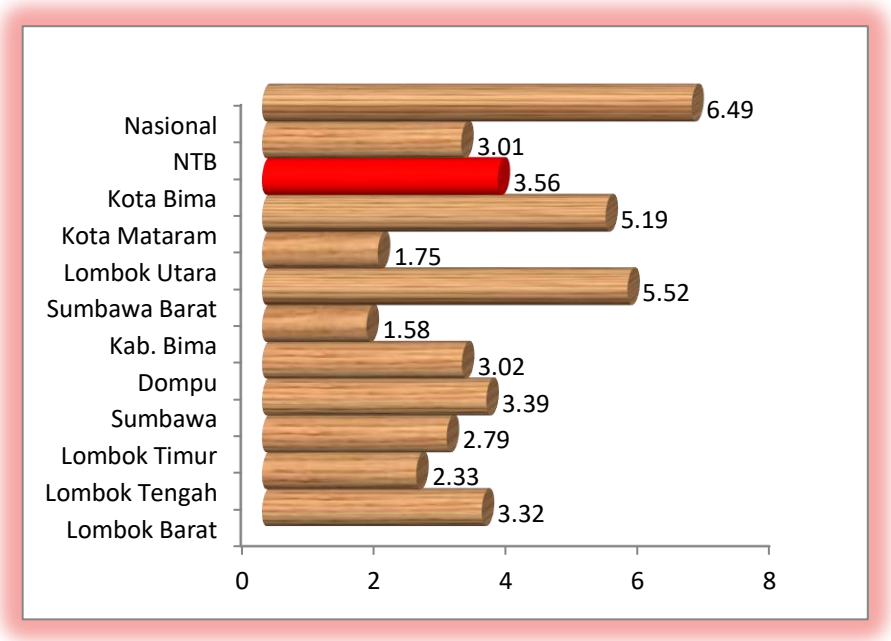

Faktor pendukung pencapaian kinerja, meliputi meningkatnya komitmen Pemerintah Kota Bima dalam

mendorong program perluasan lapangan kerja, membangun kelembagaan dan sarana prasarana ketenagakerjaan, seperti membentuk Dinas Tenaga Kerja dan Balai Latihan Kerja (BLK). Sedangkan **hambatan** dalam pencapaian kinerja berupa belum adanya pembangunan BLK yang representatif sehingga menghambat peningkatan ketrampilan masyarakat pencari kerja. **Solusi** untuk meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan kedepannya melalui peningkatan SDM dan sarana prasarana ketenagakerjaan.

h. Sasaran 8 : Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Sasaran 8 yaitu menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu; (1) Nilai SAKIP;(2) LPPD dan (3) Opini BPK. Adapun hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.18
Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 8

Sasaran 8	Indikator Kinerja	2020		Capaian Kinerja ((%)
		Target	Realisasi	
Meningkatya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	B (72)	B (68,48)	95
	Nilai LPPD	Sangat Tinggi (3,2100)	Baik (3,2595)	102
	Opini BPK	WTP	WTP	100

Selanjutnya analisis capaian pada masing-masing indikator kinerja dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1) **Indikator Kinerja Sasaran SAKIP**

Perolehan nilai SAKIP Pemerintah Kota Bima Tahun 2020 sebesar 68,48 dengan predikat kategori nilai baik (B). Nilai SAKIP yang diukur merupakan pelaksanaan anggaran 2019, tetapi dilaporkan pada Tahun 2020 oleh Pemerintah Kota Bima kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk Tahun 2020 bahwa nilai SAKIP Kota Bima merupakan yang tertinggi untuk 10 Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan nilai tersebut, maka capaian kinerja Pemerintah Kota Bima untuk indikator kinerja sasaran SAKIP yaitu sebesar 95 %. Untuk analisis pencapaian kinerja Nilai SAKIP dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut.

Tabel 3.19
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP

Indikator Kinerja	2020		Capaian Kinerja ((%)
	Target	Realisasi	
Nilai SAKIP	B (72,00)	B (68,48)	95

Berdasarkan realisasi capaian tersebut, maka kinerja Pemerintah Kota Bima pada Tahun 2020 mengalami

peningkatan sebesar 1,43 poin dibanding Tahun 2019. Hasil penilaian tersebut mencerminkan bahwa akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bima mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.10
Perolehan Nilai SAKIP Pemerintah Kota Bima
Tahun 2015-2020

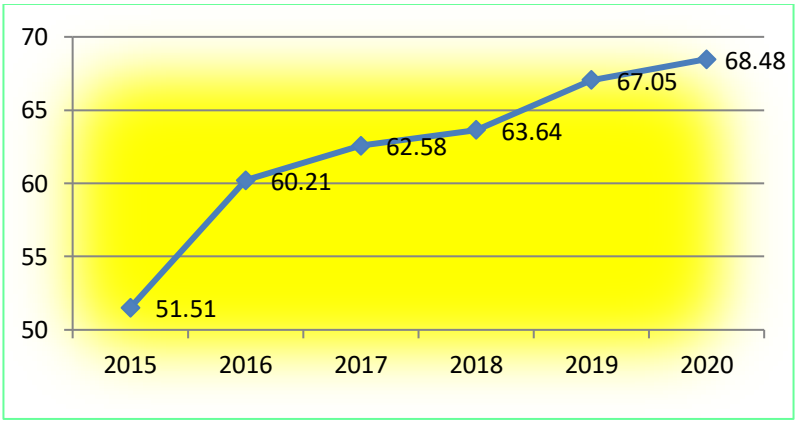

``

Berdasarkan pada masing-masing indikator utama penilaian SAKIP, maka adanya peningkatan nilai SAKIP pada seluruh indikator, baik aspek perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.20
Perbandingan Nilai SAKIP Kota Bima Tahun 2019-2020

Indikator	2019	2020	Laju Pertumbuhan
Perencanaan	22,98	23,33	0,35
Pengukuran Kinerja	17,91	18,33	0,42
Pelaporan	10,68	10,84	0,16
Evaluasi Kinerja	5,76	5,91	0,15
Capaian Kinerja	9,72	10,07	0,35
Rata-rata	67,05	68,48	1,43

Berdasarkan analisis tersebut bahwa sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bima telah berada dalam kondisi yang baik, meskipun masih perlu peningkatan kualitas sistem yang didukung oleh modifikasi atau inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi secara online. Selanjutnya rincian perolehan nilai pada masing-masing indikator SAKIP dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.11
Perolehan Nilai SAKIP Kota Bima
Menurut Indikator Penilaian sejak Tahun 2015-2020

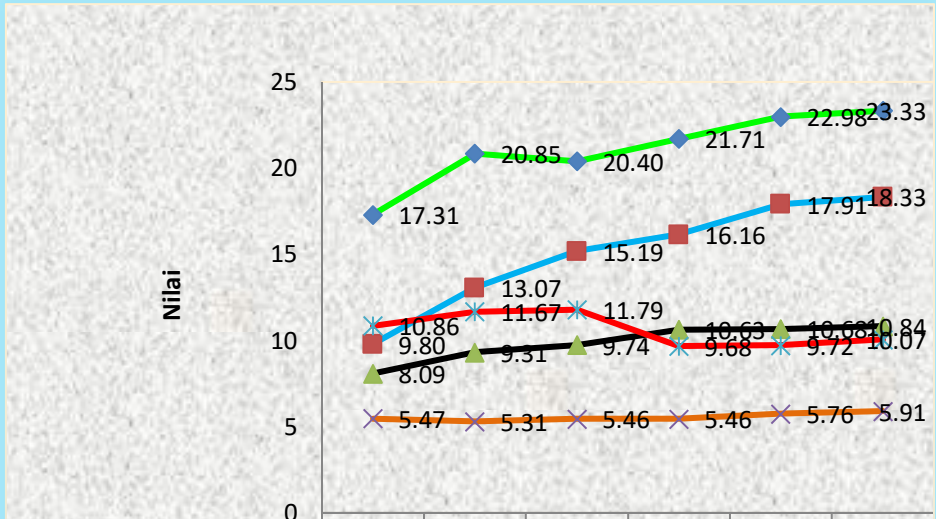

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Perencanaan	17.31	20.85	20.40	21.71	22.98	23.33
Pengukuran Kinerja	9.80	13.07	15.19	16.16	17.91	18.33
Pelaporan	8.09	9.31	9.74	10.63	10.68	10.84
Evaluasi Kinerja	5.47	5.31	5.46	5.46	5.76	5.91
Capaian Kinerja	10.86	11.67	11.79	9.68	9.72	10.07

Faktor pendukung pencapaian kinerja, meliputi meningkatnya komitmen kepala daerah dan perangkat daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah, sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** berupa masih lemah aspek koordinasi dalam penggunaan aplikasi pada setiap pelayanan sehingga menghambat akuntabilitas kinerja lingkup Pemerintah Kota Bima secara transparan. **Solusi** untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja lingkup Pemerintah Kota Bima adalah

melalui pembangunan berbasis teknologi informasi, baik perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

2) **Indikator Sasaran LPPD**

LPPD merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Berdasarkan hasil evaluasi EKPPD Tahun 2019 yang merupakan hasil EKPPD tahun 2018 oleh Tim Provinsi bersama BPKP Nomor LHE-493/PW23/3/2019, Tanggal 30 Agustus 2019 bahwa LPPD Pemerintah Kota Bima tahun 2018 memperoleh skor 3,2595 dengan kategori Prestasi Sangat Tinggi. Adapun analisis capaian indikator kinerja nilai LPPD Tahun 2019 sebagaimana pada tabel 3.16 berikut.

Tabel 3.21
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Nilai LPPD

Indikator Kinerja	2019		Capaian Kinerja ((%)
	Target	Realisasi	
Nilai LPPD	Sangat Tinggi (3,1930)	Sangat Tinggi (3,2595)	102

Atas pencapaian tersebut telah menempatkan status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada urutan ke 4 (keempat) dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat. Jika dianalisis perolehan nilai selama 6

(enam) Tahun terakhir bahwa nilai LPPD Kota Bima cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Sejak tahun 2013 Kota Bima telah memperoleh nilai 2,5671 dengan predikat baik, lalu tahun 2014 naik sebanyak 0,3045 poin, tahun 2015 naik 0,1550 poin, tahun 2016 naik menjadi 3,1654, meskipun pada tahun 2017 sempat turun sebesar 0,1698 dibanding tahun 2016. kemudian meningkat kembali pada tahun 2018 sebesar 0,2641 poin, secara rinci perolehan LPDD selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.22
Nilai LPPD Pemerintah Kota Bima
Selama Tahun 2015 - 2018

Tahun	Predikat	Nilai	Laju Pertumbuhan
2013	Baik	2,5671	-
2014	Baik	2,8716	0,3045
2015	Sangat Baik	3,0266	0,1550
2016	Sangat Baik	3,1652	0,1386
2017	Baik	2,9954	- 0,1698
2018	Sangat Baik	3,2595	0,2641

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja tahun 2019 bahwa Pemerintah Kota Bima telah mampu mencapai kinerja sebesar 102% dari target RPJMD. Perolehan nilai Tahun 2019 merupakan perolehan kinerja tertinggi, jika dibanding perolehan nilai 3 (tiga) tahun

sebelumnya, Atas perolehan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Kota Bima, selanjutnya daftar perolehan nilai selama 4 tahun dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.12
Perolehan Nilai LPPD Pemerintah Kota Bima
Selama Tahun 2015-2018

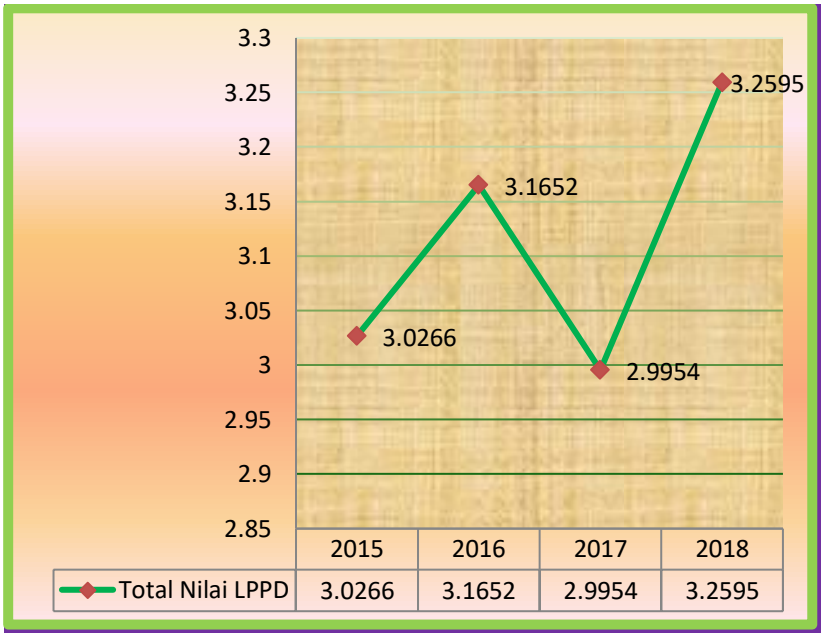

Faktor pendukung pencapaian kinerja, meliputi meningkatnya komitmen kepala daerah dan perangkat daerah dalam melaksanakan pelayanan terhadap seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** yaitu masih rendah pencapaian beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) sehingga menghambat pencapaian kinerja Pemerintah Kota Bima.

Solusi untuk kedepan Pemerintah Kota Bima perlu melakukan perbaikan perencanaan dan inovasi pelayanan guna meningkatkan pencapaian kinerja yang lebih baik.

3) **Indikator Sasaran Opini BPK**

Opini BPKP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memenuhi kriteria antara lain :

a) Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.
b) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Daerah atas pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik.
c) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping ketiga kriteria utama tersebut LKPD yang disajikan harus didukung dengan bukti-bukti audit yang mencukupi, tidak terdapat ketidakpastian dan kesalahan yang cukup berarti (*no material uncertainties*), pengelolaan atas *Cash flow* dikontrol dengan baik, dan pengelolaan atas aset daerah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap. Artinya, laporan keuangan yang disajikan

telah bebas dari kesalahan- kesalahan atau kekeliruan yang material.

Berdasarkan surat Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi NTB, Nomor: 214/S/XIX.MTR/05/2021 Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan NTB terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Bima yang dikeluarkan pada tahun 2021 merupakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Bima tahun 2020 diperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sehingga sesuai dengan target. Status opini dari BPK terhadap hasil pemeriksaan LKPD Kota Bima menandakan semakin baiknya pengelolaan keuangan pemerintah Kota Bima dari tahun ke tahun, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.23
Pencapaian Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Kota Bima tahun 2014-2020

Tahun	Predikat	Nilai	Capaian Kinerja (%)
2014	WTP	WTP	100
2015	WTP	WTP	100
2016	WTP	WTP	100
2017	WTP	WTP	100
2018	WTP	WTP	100
2019	WTP	WTP	100
2020	WTP	WTP	100

Sumber : BPK RI Perwakilan NTB

Pemerintah Kota Bima meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Dengan demikian target RPJMD sampai tahun 2021 telah tercapai 100%. Faktor yang mendukung capaian hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kota Bima adalah sebagai berikut :

1) Komitmen yang sangat tinggi kepala daerah dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Bima dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah ke arah yang lebih baik;
2) Pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan LKPD bekerja sama dengan BPKP perwakilan NTB;
3) Pengelolaan keuangan dan aset daerah didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi SIMDA dan SIMBADA.

Adapun upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima untuk meningkatkan capaian kinerja opini hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kota Bima pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1) Memperbaiki kelemahan sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan;

2) Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan.

i. Sasaran 9 : Meningkatnya kemandirian keuangan Daerah

Sasaran 9 yaitu meningkatnya kemandirian keuangan Daerah, diukur dengan indikator kinerja rasio PAD terhadap APBD. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kota Bima memperoleh PAD sebesar Rp. 46,869,411,338.19 atau 79,59 % dari target sebesar Rp. 58,906,077,012.12. Berdasarkan PAD tersebut, maka capaian kinerja Pemerintah Kota Bima untuk indikator kinerja sasaran Rasio PAD terhadap APBD yaitu sebesar 103 %. Untuk analisis pencapaian kinerja Sasaran 9 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.23
Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 9

Sasaran 9	Indikator Kinerja	2021		Capaian Kinerja Tahun 2019 ((%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya kemandirian keuangan	Rasio PAD terhadap APBD	6	6,2	103

Hasil perolehan tersebut mencerminkan kinerja Pemerintah Kota Bima dalam meningkatkan PAD dalam kondisi sangat baik, meskipun realisasi capaian PAD tersebut mengalami penurunan sebesar 0,75 % dibanding Tahun 2020. sebagaimana terlihat pada tabel 3.10 berikut ini.

Tabel 3.24
PAD Pemerintah Kota Bima tahun 2015 - 2021

Tahun	PAD
2015	30.266.723.064,23
2016	30.529.862.792,78
2017	51.892.384.238,67
2018	46.504.957.238,56
2019	50.472.550.773,75
2020	47,224,550,809.00
2021	46,869,411,338.19

Faktor pendukung pencapaian kinerja karena adanya peningkatan komitmen petugas dalam mengamankan kebocoran penerimaan PAD, sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** berupa masih lemah sistem dan sarana prasarana pelayananan sehingga menghambat transparansi penerimaan. **Solusi** untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada penerimaan PAD lingkup Pemerintah Kota Bima melalui identifikasi potensi sumber PAD pada sektor-sektor potensial dan penerapan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi dalam pengelolaan PAD.

j. Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mengukur sasaran 10 : meningkatnya kualitas pelayanan publik, diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat. Pelaksanaan pengukuran ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R I

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Bima tahun 2021 sebesar 83,42 dengan predikat baik. Atas perolehan tersebut, maka Pemerintah Kota Bima telah berhasil mencapai target kinerja sebesar 97 % dari target RPJMD sebesar 86,00. Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran 10 dapat dilihat tabel 3.22 berikut.

Tabel 3.25
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 10

Sasaran 10	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	Rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) lingkup Pemerintah Kota Bima	B (86,00)	B (83,42)	97

Adapun hasil pengukuran nilai IKM pada masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik lingkup Pemerintah Kota Bima tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 3.26
Pengukuran IKM pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Perangkat Daerah/Unit	IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Layanan
1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP	70,79	B	Baik
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	91,13	A	Sangat Baik
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	80,75	B	Baik
4. Dinas Pertanian	78,87	B	Baik
5. Dinas Kelautan dan Perikanan	90,85	A	Baik
6. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	81,03	B	Baik
7. Dinas Sosial	90,58	A	Baik
8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83,53	B	Baik
9. Dinas Pariwisata	78,70	B	Cukup
10. RSUD	83,64	B	Baik
11. Puskesmas Rasanae Timur	83,25	B	Baik
12. Puskesmas Mpunda	80,59	B	Baik
13. Puskesmas Penanae	84,30	B	Baik
14. Puskesmas Paruga	89,84	A	Baik
Rata-Rata IKM	83,42	B	Baik

Secara umum perolehan IKM pada unit penyelenggara pelayanan publik rata-rata memperoleh kategori **"Baik"**. Hal ini cukup menggembirakan mengingat Pemerintah Kota Bima termasuk daerah otonom yang baru dibentuk sejak tahun 2002. Adapun persentase kategori Perangkat Daerah/Unit, antara lain ; (1) Sangat baik sebanyak 10 unit atau 15 %;(2) Baik sebanyak 10 Unit atau 78 %;(3) Cukup baik sebanyak 1 unit atau 7 %.

Adapun perolehan nilai rata-rata pada masing-masing unsur pelayanan, dapat tersaji pada grafik 3.16 berikut.

Grafik 3.12
Nilai pada unsur pelayanan publik Tahun 2021

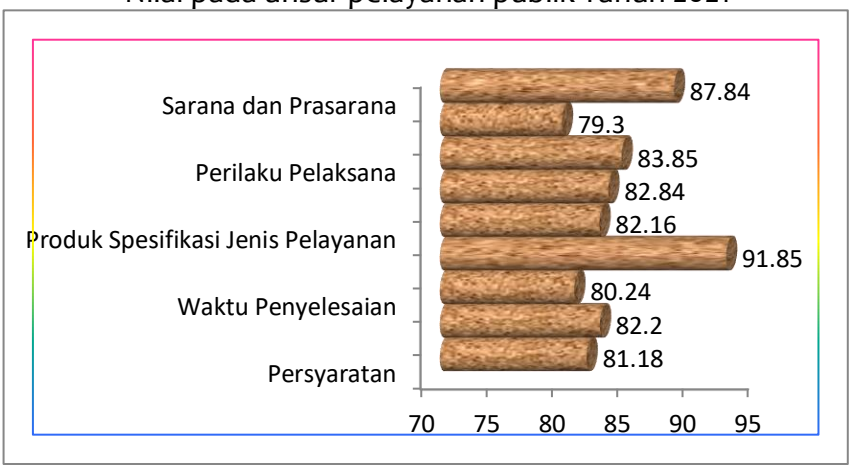

Faktor-faktor pendukung pencapaian sasaran adalah adanya Kemitraan dan koordinasi dengan Dinas/badan teknis terkait; tersedianya Sumber Daya Pegawai yang cukup memadai; tersedianya sarana dan prasarana pendukung. Selain itu faktor pendukung lainnya, dipengaruhi oleh semakin membaiknya penyiapan pada standar pelayanan publik, baik persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya, produk, kompetensi, perilaku pelayanan, maklumat pelayanan, dan penanganan pengaduan, sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** berupa masih belum memiliki aplikasi pelayanan online. **Solusi** untuk meningkatkan pelayanan publik di

Pemerintah Kota Bima yaitu dengan membuat inovasi layanan berbasis online.

k. **Sasaran 11 : Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang**

Untuk mengukur sasaran 11 : meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang, diukur dengan indikator kinerja indeks kesesuaian tata ruang. Indeks kesesuaian tata ruang pada tahun 2021 sebesar 98,5. Berdasarkan perolehan tersebut, maka Pemerintah Kota Bima pada tahun 2019 telah mampu mencapai kinerja sebesar 99 % dari target RPJMD. Untuk rincian analisis capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.27
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 11

Sasaran 11	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Indeks kesusaian tata ruang	98,5	98,1	99

Berdasarkan analisis data bahwa indeks kesesuai tata ruang Kota Bima sebesar 98,1, sedangkan yang mengalami ketidaksesuaian sebesar 1,9, sebagaimana rinciannya terlihat pada gambar 3.1 dan 3.2 berikut.

Gambar 3.1
Indikasi ketidaksesuaian lahan Tahun 2021

Indikasi Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang Kota Bima

Berdasarkan Audit Tata Ruang Tahun 2015, ditemukan indikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebanyak ***39 titik lokasi***.

NO	TIPOLOGI	JUMLAH INDIKASI KETIDAKSESUAIAN PEMANFAATAN RUANG	INDIKASI RENCANA POLA RUANG WILAYAH YANG TERINDIKASI DILANGGAR
1	TIPOLOGI A	-	-
2	TIPOLOGI B	33	Perkebunan, Sempadan Sungai, Kawasan Pertanian / Sawah,, Rencana Penggunaan Lainnya,
3	TIPOLOGI C	6	Perkebunan, Sempadan Pantai, dan Rencana Penggunaan Lainnya
TOTAL		39	

REKAPITULASI KETIDAKSESUAIAN TIPOLOGI B

Lokasi Indikasi Ketidaksesuaian	Jumlah Titik
Sempadan Sungai	21
Rencana Penggunaan Lainnya	7
Perkebunan	3
Kawasan Pertanian/Sawah	2
Total Indikasi Ketidaksesuaian	33

REKAPITULASI KETIDAKSESUAIAN TIPOLOGI C

Lokasi Indikasi Ketidaksesuaian	Jumlah Titik
Perkebunan	1
Sempadan Pantai	1
Rencana Penggunaan Lainnya	4
TOTAL	**6**

I.n.d.i.k.a.s.i K.e.t.i.d.a.k.s.e.s.u.a.i.a.n

13

Gambar 3.2
Sebaran titik lokasi indikasi ketidaksesuaian lahan tahun 2021

Sebaran Titik Lokasi Indikasi Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang Tipe C di Kota Bima

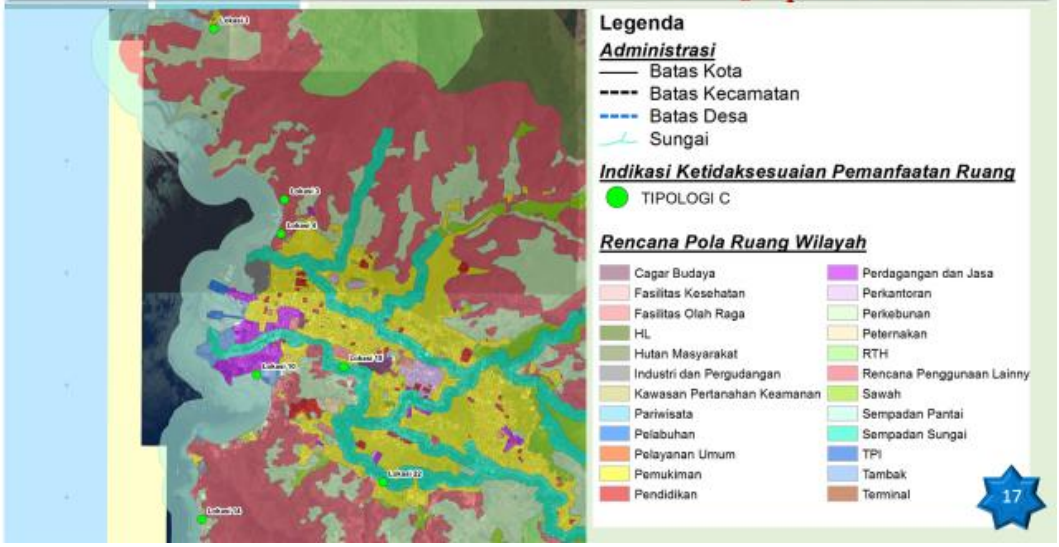

I. Sasaran 12 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Untuk mengukur sasaran 12 : meningkatnya kualitas lingkungan hidup, diukur dengan indikator kinerja indeks kualitas

lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup di Kota Bima pada tahun 2021 sebesar 53,73 dengan kategori sangat kurang. Berdasarkan perolehan tersebut, maka Pemerintah Kota Bima pada tahun 2021 telah belum mampu mencapai kinerja sebesar 85 % dari target RPJMD. Untuk rincian analisis capaian kinerja sasaran 12 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.28
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 12

Sasaran 12	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	85	52,73	62

Jika dibandingkan dengan IKLH Tahun 2018, maka IKLH Kota Bima pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 7,43 sebagaimana terlihat grafik 3.17 berikut.

Grafik 3.13
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bima
Tahun 2018-2019

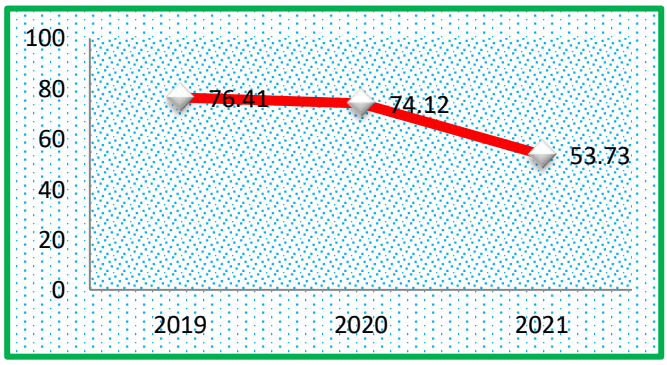

Faktor pendukung pencapaian sasaran 12 yaitu adanya Program pada Dinas Lingkungan Hidup, **Faktor penghambat** bahwa adanya air limbah permukiman masih belum optimal. **Solusinya** diperlukan program pendampingan penanganan sampah skala lingkungan.

m. **Sasaran 13 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah**

Sasaran 13 yaitu meningkatnya kualitas infrastruktur daerah, diukur dengan indikator kinerja Persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik. Persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik di Kota Bima pada Tahun 2021 sebesar 19 persen. Atas perolehan tersebut, maka Pemerintah Kota Bima belum mampu mencapai kinerja % dari target RPJMD sebesar 51 persen. Untuk rincian analisis capaian kinerja sasaran 13 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.29
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 13

Sasaran 13	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik	51	9,94	19

Grafik 3.14
Persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik Tahun 2019-2021

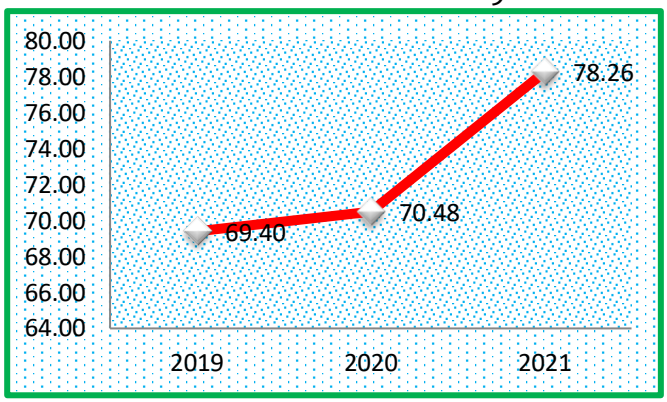

Rinciannnya sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.30
Persentase Infrastruktur Daerah dalam Kondisi Baik Tahun 2021

No	Infrastruktur Daerah	%
1.	Persentase Peningkatan Rumah Tangga Bersanitasi layak	89,99
2.	Persentase Peningkatan Rumah tangga pengguna air bersih/air	83,23
3.	Persentase Peningkatan Saluran Drainase dalam kondisi baik	54,23
4.	Persentase Peningkatan Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Mantap	74,39
5.	Persentase peningkatan luas area pertanian yang terlayani irigasi teknis	70,04
6.	Persentase Peningkatan luas ruang yang sesuai peruntukannya	97,73
Rata-rata		78,26

Faktor pendukung pencapaian sasaran 13 yaitu adanya Program Perencanaan Pemukiman Kumuh melalui kegiatan Pendampingan Perencanaan dan Penanganan Kumuh Kota Bima melalui Pokja PKP dan (Kotaku). **Faktor penghambat bahwa** penanganan sampah permukiman dan penanganan air limbah permukiman sebagai bagian dari upaya terintegrasi mengatasi kekumuhan, masih memerlukan upaya lebih dalam mengurangi kawasan kumuh. **Solusinya** diperlukan upaya terintegrasi

penanganan air limbah permukiman dan pengurangan kekumuhan di Kota Bima.

n. Sasaran 14 : Meningkatnya Ketahanan terhadap Bencana

Untuk mengukur sasaran 14 : meningkatnya ketahanan terhadap bencana, diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu indeks ketahanan daerah. Indeks ketahanan daerah Kota Bima tahun 2021 sebesar 92,61 (sedang). Atas perolehan tersebut, maka Pemerintah Kota Bima telah berhasil mencapai target kinerja sebesar 108 % dari target RPJMD sebesar 86. Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran 15 dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 3.32
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 14

Sasaran 14	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	86	92,61	108

Grafik.3.15
Indeks Ketahanan Daerah Kota Bima Tahun 2015-2021

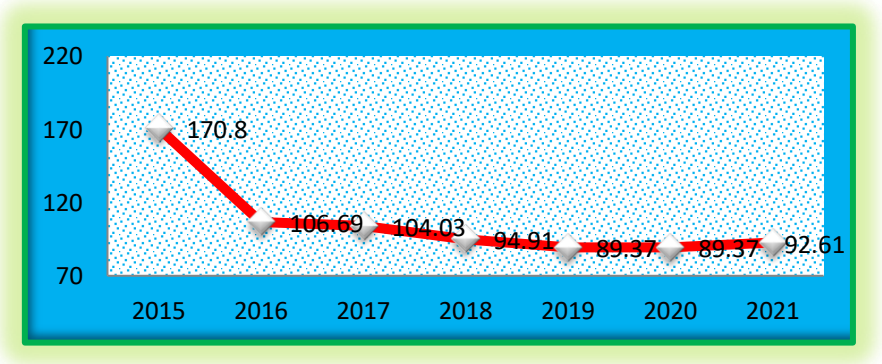

Jika dibanding tahun 2020, maka Indeks ketahanan daerah pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,24 poin, Adapun rinciannya tersaji pada tabel berikut dibawah ini:

Tabel 3.33
Indeks Ketahanan Daerah Kota Bima Tahun 2021
Berdasarkan jenis dan tingkat resiko

Prioritas Penilaian Indeks Ketahanan Daerah	Capaian (%)	
	Skor	Kelas Resiko
1. Banjir	21,11	Tinggi
2. Gempa Bumi	6.67	Sedang
3. Tsunami	3.80	Rendah
4. Letusan Gunung Api	7,90	Sedang
5. Kebakaran Hutan dan Lahan	21,11	Tinggi
6. Tanah Longsor	14,08	Sedang
7. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	21,11	Tinggi
8. Kekeringan	4,69	Rendah
9. Cuaca Ektrim	7,98	Sedang

Faktor-faktor pendukung pencapaian sasaran 15 yaitu adanya PUSDALOPS yang telah terintegrasi dengan pusat, sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** berupa masih belum optimalnya pencegahan dan mitigasi bencana maupun kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana. **Solusi** untuk kedepannya berusaha meningkatkan program mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

o. Sasaran 15 : Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban

Untuk mengukur sasaran 15 : meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban, diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu Persentase penurunan Angka kriminalitas, dan Persentase penurunan Angka konflik sosial.

1) Persentase penurunan Angka kriminalitas

Pada Tahun 2020 telah terjadi kenaikan persentase Angka kriminalitas Kota Bima sebanyak 191 kasus atau 66 persen dibanding tahun 2019. Atas perolehan tersebut, maka Pemerintah Kota Bima belum mampu mencapai kinerja sebesar dari target RPJMD sebesar 35 persen. Analisis penurunan angka kriminalitas dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 3.34
Persentase Penurunan Angka Kriminalitas
di Kota Bima Tahun 2019-2020

Kasus Kriminalitas	Jumah Kasus		Penurunan	
	2019	2020	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5)
Angka Kriminalitas	288	479	575	66

Grafik 3.16
Perbandingan angka kriminalitas di Kota Bima tahun 2016-2020

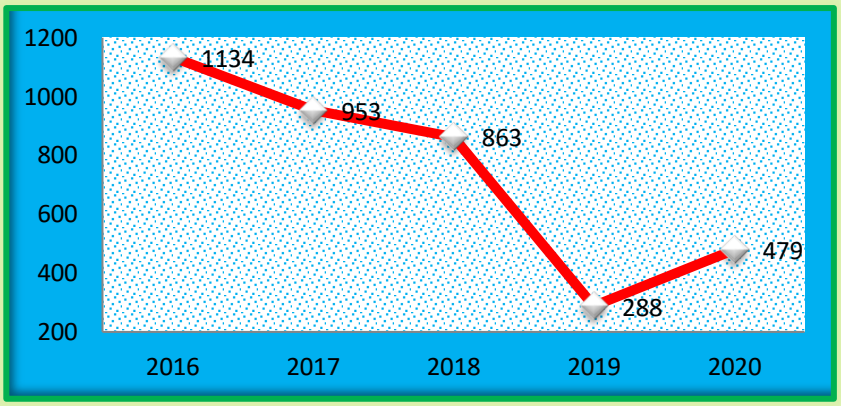

Oleh karena itu pada Tahun 2020 Pemerintah Kota Bima belum mampu mencapai kinerja sebesar dari target RPJMD sebesar 35 persen. Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran 16 dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 3.35
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 15

Sasaran 15	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban	Persentase penurunan Angka kriminalitas	35	66	-189

Jika dibandingkan dengan angka kriminalitas yang ada di Kabupaten/Kota lainnya di NTB bahwa jumlah angka kriminalitas di Kota Bima masih termasuk kategori terendah ketiga setelah Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Utara, sebagaimana terlihat pada grafik berikut.

2) Persentase penurunan Angka konflik sosial.

Persentase Penurunan Angka Konflik Sosial Kota Bima Tahun 2021 sebesar 33 persen dibanding tahun 2020. Atas perolehan tersebut, maka Pemerintah Kota Bima telah berhasil mencapai kinerja sebesar 784 dari target RPJMD sebesar 16,7 persen. Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran 16 dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 3.36
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 15

Sasaran 15	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Capaian Kinerja T (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban k	Persentase penurunan Angka Konfllik Sosial	16,7 %	131 %	784

jika bandingkan dengan persentase konflik sosial pada Tahun 2020 maka telah terjadi penurunan persentase angka konflik sosial pada Tahun 2021 sebesar 131 persen, sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.37
Persentase Penurunan Angka Kriminalitas
di Kota Bima Tahun 2018-2019

Indikator	Jumah Kasus		Penurunan	
	2019	2020	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5)
Angka Konflik Sosial	60	26	34	131

Faktor-faktor pendukung pencapaian sasaran 15 yaitu adanya intervensi program yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan terbentuknya forum-forum seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Konflik Sosial (FPK) yang ikut mendukung penurunan angka kriminalitas dan konflik sosial di Kota Bima, sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** berupa masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam pencegahan tindakan criminal. **Solusi** untuk kedepannya berusaha meningkatkan program pencegahan kriminalitas dan konflik sosial.

p. **Sasaran 16 : Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal.**

Untuk mengukur sasaran 16 Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal yaitu

menggunakan Indikator Persentase peningkatan nilai budaya, adat dan tradisi yang dibina.

1) Indikator Persentase peningkatan nilai budaya, adat dan tradisi yang dibina

Persentase peningkatan nilai budaya, adat dan tradisi yang dibina Kota Bima tahun 2021 sebanyak 37 jenis nilai budaya, adat dan tradisi. Atas perolehan tersebut, maka Pemerintah Kota Bima telah berhasil meningkatkan persentase nilai budaya, adat dan tradisi yang dibina Kota Bima sebesar 5,4 % sehingga telah mampu melebihi dari target RPJMD sebesar 4,2 %. Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran 16 dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 3.38
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 16

Sasaran 16	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Persentase peningkatan nilai budaya, adat dan tradisi yang dibina	4,2	5,4	128

Tabel 3.39
Jumlah nilai budaya, adat dan tradisi
yang dibina di Kota Bima Tahun 2020-2021

Jumlah nilai budaya, adat dan tradisi yang dibina		Penurunan	
2019	2020	Jumlah	%
(1)	(2)	(3=2-1)	(4)
35	37	2	5,4

Faktor-faktor pendukung pencapaian sasaran 15 yaitu adanya intervensi program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

q. Sasaran 17 : Meningkatnya Pengalaman Ajaran Agama.

Untuk mengukur sasaran 17 : Meningkatnya Pengalaman Ajaran Agama yaitu dengan menggunakan indikator indeks kerukunan umat beragama.

1) Indikator Indeks kerukunan umat beragama

Indeks kerukunan umat beragama Kota Bima Tahun 2021 sebesar 96,89 %. Atas perolehan tersebut, maka Pemerintah Kota Bima telah berhasil mencapai dari target RPJMD sebesar 86 %. Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran 16 dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 3.40
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 16

Sasaran 16	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Indeks kerukunan umat beragama Kota Bima	86 %	96,89 %	112

Grafik 3.17
Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kota Bima
Tahun 2015-2021

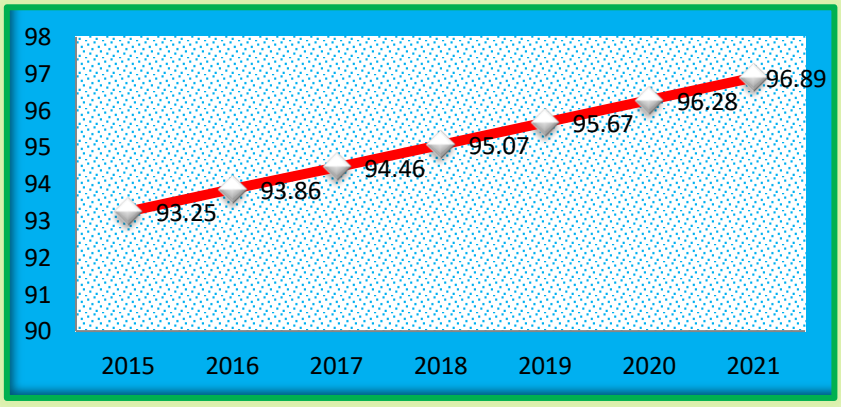

Faktor-faktor pendukung pencapaian sasaran 15 yaitu adanya intervensi program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

B. Realisasi Keuangan

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun 2021 sebesar Rp. 754,078,303,532.00 dengan realisasi sebesar Rp. 716,700,153,286.42 atau 95,04 %.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kota Bima Tahun 2021 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan Pemerintah yang baik (*Good Governance*). Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran bahwa Pemerintah Kota Bima telah berhasil meraih kinerja rata-rata 97 persen dengan kategori "Sangat Tinggi" dari 17 sasaran, yang terdiri dari ; (a) 13 sasaran termasuk kategori sangat tinggi, (b) 1 sasaran termasuk kategori tinggi, (c) 1 sasaran termasuk kategori rendah. dan (d) 2 sasaran termasuk kategori sangat rendah.

Pencapaian kinerja Pemerintah Kota Bima Tahun 2021 menunjukkan keberhasilan dalam memenuhi target tahunan sesuai RPJMD 2018-2023. Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kota Bima juga didukung dengan adanya alokasi APBD Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2021. Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2021 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Adapun adanya target yang masih kurang pencapaiannya Pemerintah Kota Bima akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit untuk perbaikan penanganan di masa mendatang. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bima Tahun 2021 kami sampaikan dan atas kerjasama seluruh pihak kami sampaikan ucapan terima kasih.

BAGIAN ORGANISASI
Jl. Soekarno Hatta No.2, Kota Bima - NTB
Tlp. 0374.646441 - 646442, Fax. 0374. 646441